KONTROL PERS TERHADAP PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI LAMPUNG

(Analisis Isi Harian Umum Kompas dan Surat Kabar Radar Lampung)

Oleh

HERI BUDIANTO

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2003
ABSTRAK


Penelitian ini secara umum mengangkat permasalahan: apakah pers melaksanakan kontrol sosial-nya dengan memuat berita tentang peran DPRD Provinsi Lampung dengan agenda pemilihan Gubernur Lampung tahun 2002, serta pembahasan dan penetapan APBD tahun 2003?


Penyajian jenis berita, baik Harian Umum Kompas maupun Surat Kabar Radar Lampung lebih banyak menampilkan berita langsung (straight news) dan kurang melakukan pendalaman berita terhadap suatu persoalan atau isu. Penggunaan sumber informasi pada Harian Umum Kompas lebih dominan oleh
tokoh masyarakat, sementara Surat Kabar Radar Lampung didominasi kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Sebagian besar pemberitaan Harian Umum Kompas dan Surat Kabar Radar Lampung cenderung negatif. Ini menunjukkan independensi dua media tersebut yang berani memberitakan kegagalan dan penyelewengan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Lampung dan keberanian pers dalam melakukan kontrol sosial terhadap lembaga legislatif Provinsi Lampung.


Saran dari penelitian ini untuk masa yang akan datang hendaknya redaksi (wartawan) Harian Umum Kompas menambah pemberitaan sisi positif tentang DPRD Provinsi Lampung dan Surat Kabar Radar Lampung lebih mengedepankan azas berimbang dan hak jawab dalam pemberitaannya.
SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul :

KONTROL PERS TERHADAP PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI LAMPUNG.
(Analisis Isi Harian Umum Kompas dan Surat Kabar Radar Lampung)

Adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Semua sumber data dan informasi yang digunakan diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya.

Bogor, 17 Nopember 2003

Heri Budianto
KONTROL PERS TERHADAP PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI LAMPUNG

(Analisis Isi Harian Umum Kompas dan Surat Kabar Radar Lampung)

Oleh:

HERI BUDIANTO

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains (M.Si) Pada Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan

SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2003

Nama Mahasiswa: Heri Budianto

Nomor Pokok: P045010201

Program Studi: Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (KMP)

Menyetujui:
1. Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Aida Vitayala S. Hubeis
Ketua

Prof. Dr. Ir. Sjafri Mangkuprawira
Anggota

Ir. Sutisna Riyanto, MS.
Anggota

2. Ketua Program Studi
Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan

Dr. Ir. Aida Vitayala S. Hubeis

Mengetahui:
Dekan Sekolah Pascasarjana IPB

Prof. Dr. Ir. Sjafrida Manuwoto, MSc.

Lulus Tanggal: 17 November 2003
RIWAYAT HIDUP


PRAKATA


Tesis ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Dr.Ir. Aida Vitayala S.Hubeis, selaku ketua komisi pembimbing atas pengarahan, bimbingan, dan dorongan yang tiada henti, sehingga penulis terus terpacu untuk menyelesaikan studi.

2. Bapak Prof. Dr. Ir. Sjafri Mangkuprawira, selaku anggota komisi pembimbing atas arahan, masukan, dan bimbingan dari mulai pembuatan usulan penelitian hingga penyelesaian tesis ini.

3. Bapak Ir. Sutisna Riyanto, MS, selaku anggota komisi pembimbing yang telah memberikan masukan, arahan, dan teman diskusi dari awal penggalian ide hingga penyelesaian tesis.

5. Para Dosen di lingkungan program studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (KMP) Sekolah Pascasarjana IPB, yang telah membina dan mendidik dengan penuh pengertian.

6. Pimpinan dan staff Sekolah Pascasarjana IPB yang telah memberikan pelayanan terbaik selama penulis menjalani pendidikan di IPB.

7. Pimpinan dan staff program studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan pedesaan (KMP) IPB, yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan selama studi.


11. Teman-teman seperjuangan KMP-2001: (Mas Iwan dan Mbak Ety), atas bantuan koding-nya. (Pak Nuh, Pak Nasir, Pak Yusuf), kalian bukan hanya teman tapi juga sekaligus orang tua. (Pak Effendi, Kak Zainil, Pak Hasbullah, Mas Arief, Pak Lutfi, Imam, Biryanto
Kang Parman), kalian teman diskusi yang menarik, (Bu Nila dan Bu Anita), ibu berdua benar-benar baik dan teruji dalam segala hal. (Mbak Frida, Bu Onike, Poppy, Bu Dwi, Marina, dan Mini), kalian baik sekali. (Mas Tono dan Bramayanti), kalian sahabat dalam suka dan duka. (Citra dan Anna) semoga kita tetap kompak dan tetap Best Friend.


13. Emak dan Ayah terkasih atas kasih sayang, ketulusan do’a, serta “kebebasan” yang diberikan sehingga ananda masih terus “bernafas” dan terus berkarya.


15. Terkhusus isteriku tercinta Ries Wulandari. SP atas dorongan semangat, kasih sayang, cinta kasih, dan pengertianannya.

serta semua fihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Terima kasih atas segala dukungan baik moril maupun materil. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dari tesis ini yang memerlukan beberapa perbaikan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat. Amin.

Bogor, Nopember 2003

Penulis
Sebelum menjadi orang-orang besar,  
Sejarah terlebih dahulu mencatat kebesaran jiwa orang-orang itu:

Semangat besar,  
Kesabaran yang besar,  
Keteguhan yang besar,  
Pengorbanan yang besar, dan juga  
Ketulusan yang besar.

Dengan kebesaran itulah  
tidak saja seorang muslim bisa meraih prestasi pribadinya,  
tapi juga sumbangsii bagi maslahat ummat.
# DAFTAR ISI

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bab</th>
<th>Halaman</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>I. DAFTAR TABEL</td>
<td>xii</td>
</tr>
<tr>
<td>II. DAFTAR GAMBAR</td>
<td>xiv</td>
</tr>
<tr>
<td>III. DAFTAR LAMPIRAN</td>
<td>xv</td>
</tr>
<tr>
<td>PENDAHULUAN</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Latar Belakang</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Perumusan Masalah</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Tujuan Penelitian</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>Kegunaan Penelitian</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Batasan Masalah</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>TINJAUAN PUSTAKA</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fungsi Kontrol dan Pengawasan oleh Pers</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>Fungsi Utama Pers</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>Pers, Masyarakat, dan Penguasa</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>Berita</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>Pengertian Berita</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>Syarat-Syarat Yang Menentukan Nilai Berita</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>Jenis Berita</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>Sumber Informasi</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>Analisis Isi</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>KERANGKA PEMIKIRAN</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kerangka Pemikiran</td>
<td>27</td>
</tr>
</tbody>
</table>
METODE PENELITIAN

Disain Penelitian ................................................................. 33
Populasi dan Sampel Penelitian ............................................. 33
Pengumpulan Data ................................................................... 35
Reliabilitas Instrumen ............................................................. 36
Analisis Data ........................................................................... 41

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Harian Umum KOMPAS .............................. 48
Sejarah Harian Umum Kompas ............................................. 48
Visi dan Misi KOMPAS .......................................................... 54
Gambaran Umum Surat Kabar Radar Lampung .................... 55
Sejarah Surat Kabar Radar Lampung .................................... 55
Visi Misi Surat Kabar Radar Lampung .................................. 61
Kontrol Pers Terhadap Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung .......................... 62

Berita Berdasarkan Jenis Berita ............................................. 66
Berita Berdasarkan Penggunaan Sumber Informasi ............... 69
Berita Berdasarkan Nilai Berita .............................................. 72
Berita Berdasarkan Tingkat Keakuratan ................................. 75
Berita Berdasarkan Tanggal Pimpinan DPRD Propinsi Lampung 81
Berita Berdasarkan Sikap Pers Dalam Tajuk Rencana/Editorial 82

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan ................................................................................. 85
Saran – Saran ......................................................................... 89

DAFTAR PUSTAKA ................................................................... 90
## DAFTAR TABEL

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tabel</th>
<th>Teks</th>
<th>Halaman</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. Koefisien Reliabilitas Antarjuri Untuk Kategori Jenis Berita...</td>
<td>38</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. Koefisien Reliabilitas Antarjuri Untuk Kategori Sumber Informasi</td>
<td>38</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3. Koefisien Reliabilitas Antarjuri Untuk Kategori Nilai Berita...</td>
<td>39</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4. Koefisien Reliabilitas Antarjuri Untuk Kategori Tingkat Keakuratan</td>
<td>39</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5. Koefisien Reliabilitas Antarjuri Untuk Kategori Tanggapan Pimpinan DPRD</td>
<td>40</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7. Frekuensi Sajian Berita Berdasarkan Peran DPRD</td>
<td>63</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8. Frekuensi Sajian Berita Berdasarkan Jenis Berita</td>
<td>66</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9. Volume (cmk) Pemuatan Sajian Jenis Berita</td>
<td>68</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10. Frekuensi Sajian Berita Berdasarkan Penggunaan Sumber Informasi</td>
<td>70</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11. Frekuensi Sajian Berita Berdasarkan Nilai Berita</td>
<td>73</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12. Frekuensi Sajian Berita Berdasarkan Tingkat Keakuratan</td>
<td>76</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gambar</td>
<td>Teks</td>
<td>Halaman</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>--------------------------------------------------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Kerangka Fungsi Kontrol Pers Dan Proses Pengolahan Berita ...</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Kerangka Pikir Operasional Kontrol Pers Terhadap DPRD ...</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>Teks</td>
<td>Halaman</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------------------------------</td>
<td>---------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. Struktur Organisasi Surat Kabar Harian Radar Lampung</td>
<td>93</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. Struktur Organisasi Kompas 2002</td>
<td>94</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3. Judul Berita Harian Umum Kompas dan Surat Kabar Radar Lampung yang dianalisis</td>
<td>95</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
PENDAHULUAN

Latar Belakang


Menddasarkan diri dari perangkat hukum tersebut di atas, secara de jure, DPRD menempati posisi yang sangat strategis, sangat kuat, dan setara dengan kekuasaan eksekutif. Hal tersebut tercermin dari tugas dan wewenang DPRD menurut Pasal 18 ayat 1 Undang-undang No 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah adalah :


6. Melaksanakan pengawasan terhadap,
   a. Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lain
   b. Pelaksanaan Keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota
   c. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
   d. Kebijakan Pemerintah Daerah, dan
   e. Pelaksanaan kerja sama internasional di daerah
   f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah
   g. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.

Kekuasaan dalam bentuk tugas dan kewenangan tersebut masih diperkuat lagi dengan hak-hak yang diberikan kepada DPRD yang termaktub di dalam Pasal 19 ayat 1, meliputi:

a. Meminta pertanggungjawaban Gubernur, Bupati, dan Walikota;

b. Meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah;

c. Mengadakan penyelidikan;

d. Mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah;

e. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah;

f. Menentukan Anggaran Belanja DPRD; dan

g. Menetapkan Tata Tertib DPRD.
Dengan adanya tugas dan wewenang serta hak-hak yang diberikan kepada DPRD yang diatur dalam perangkat perundang-undangan tersebut membuat kewenangan dan kedudukan DPRD sangat kuat dan menonjol, sehingga menimbulkan berbagai kemungkinan penyalahgunaan kewenangan yang telah diatur didalam undang-undang tersebut.


Selain melakukan penggantian kepemimpinan daerah, peran, tugas dan wewenang DPRD juga berkewajiban membuat keputusan, kebijakan dan peraturan-peraturan daerah untuk mendorong pembangunan di daerah pada semua bidang pembangunan termasuk di dalamnya pembangunan bidang pertanian dan pedesaan.

Wujud nyata dari peran DPRD di dalam pembangunan daerah tersebut telah diatur di dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah seperti yang telah diuraikan di atas, yakni bersama-
sama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan membentuk Peraturan Daerah.

Anggaran pembangunan daerah menjadi kunci utama untuk keberlangsungan pembangunan di daerah. Untuk itu sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, maka DPRD berkewajiban mendorong laju pembangunan dengan memperhatikan, memberikan masukan, pertimbangan dan memutuskan terhadap anggaran pembangunan di semua bidang yang ditetapkan didalam APBD.

Melihat kondisi ini muncul pertanyaan siapa yang mengawasi dan mengontrol DPRD ?. Satu pertanyaan yang hingga kini belum dapat dijawab secara pasti, dalam arti melalui pengaturan yang resmi. Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, tidak menyebutkan siapa yang mengawasi lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peran kontrol masyarakat (Civil Society) dalam rangka pembangunan daerah sangat penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih. Pemberdayaan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi kepemudaan serta organisasi paguyuban lainnya perlu ditingkatkan untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pembangunan. Peran kontrol tersebut dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan. (Ida, 2002).

Prinsip keterbukaan tersebut dapat dilaksanakan dengan berkolaborasi dengan pers, sebagai salah satu lembaga yang mempunyai peran dan fungsi sebagai alat kontrol sosial. Seperti dikatakan oleh Yudhoyono (2001), berbagai media massa baik cetak maupun elektronik, baik itu halaman atau rubrik berita hampir setiap hari diwarnai dengan pemberitaan mengenai sikap dan perilaku
anggota DPRD yang berindikasi tidak etis, menyimpang, dan melanggar norma-norma standar politik dan pemerintahan.


Penelitian ini tentunya sangat bermanfaat untuk mengetahui apakah media massa khususnya surat kabar telah melakukan fungsi kontrol sosialnya dalam pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara. Informasi-informasi yang disajikan tentunya penting untuk memberikan gambaran mengenai surat kabar Indonesia, khususnya dalam konteks pembangunan demokrasi. Penelitian ini dirancang
untuk menganalisis kuantitas dan penekanan isi berita-berita tentang DPRD Provinsi Lampung pada Harian Umum Kompas sebagai surat kabar nasional yang terbit di Ibukota dan Surat Kabar Harian Radar Lampung sebagai surat kabar daerah (lokal) yang terbit di Ibukota Provinsi Lampung.

Dipilihnya dua surat kabar ini sebagai lokasi penelitian karena hasil *Survei Nielsen Media Research* terhadap jumlah pembaca di delapan surat kabar yang beredar di Lampung yaitu: Radar Lampung, Lampung Post, Lampung Ekspress (koran lokal Lampung), Kompas, Media Indonesia, Harian Tempo, Rakyat Merdeka, dan Lampu Merah (koran nasional) pada tahun 2002 di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa Surat Kabar Harian Radar Lampung (koran lokal) memiliki pembaca paling banyak (peringkat pertama) di Provinsi Lampung dengan jumlah pembaca 60,000 pembaca. Sedangkan Harian Umum Kompas sebagai media nasional sebanyak 16,000 pembaca (urutan pertama koran nasional). (Radar Lampung, 3 Maret 2003).

**Perumusan Masalah**

Untuk melaksanakan peran kontrol sosial terhadap DPRD, pers melakukan kegiatan-kegiatan jurnalistiknya, dengan melakukan peliputan-peliputan yang dikemas dan disajikan dalam bentuk berita yang kemudian disampaikan kepada masyarakat. Tidak semua pers dapat secara berani menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam kaitannya dengan pelaksanaan kontrol terhadap lembaga pemerintah. Hal tersebut berkaitan dengan
independensi suatu organisasi pers. Apabila ada unsur pemerintah di dalam organisasi pers, sudah dapat dipastikan akan sulit pers tersebut melaksanakan peran kontrolnya.


Peran kontrol pers dapat diketahui melalui keberanian pemuaatan berita-berita tentang DPRD, maka dalam penelitian ini diharapkan diketahui frekuensi, volume jenis berita, sumber informasi, nilai dan akurasi berita. Analisis berita, umumnya menganalisis frekuensi dan volume jenis berita, sumber informasi, nilai dan akurasi berita. Penelitian ini dilengkapi dengan analisis frekuensi dan volume jenis berita, sumber informasi, nilai berita dan akurasi berita. Dengan analisis ini diharapkan dapat mengetahui informasi frekuensi dan volume jenis berita, dan partisipasi masyarakat (Civil Society) sebagai sumber informasi, nilai berita serta tingkat keakuratan berita yakni kesesuaian judul, pencantuman waktu, penggunaan informasi pendukung, dan fakultas berita, sehingga dapat diketahui peran kontrol pers terhadap DPRD.

Selain itu, penelitian ini juga ingin mengetahui ada tidaknya tanggapan dari pimpinan DPRD Provinsi Lampung melalui Harian Umum Kompas dan Surat Kabar Radar Lampung, serta sikap pers yang dimuat dalam tajuk rencana

Oleh karena itu secara umum rumusan masalah penelitian ini: apakah pers melaksanakan kontrol sosial-nya dengan memuat berita tentang peran DPRD Provinsi Lampung dengan agenda pemilihan Gubernur Lampung tahun 2002, serta pembahasan dan penetapan APBD tahun 2003? Secara spesifik adalah:


2. Bagaimana nilai berita Harian Umum Kompas dan Surat Kabar Radar Lampung tentang peran DPRD Provinsi Lampung menyangkut dua agenda tersebut?


4. Apakah ada tanggapan dari pimpinan DPRD Provinsi Lampung melalui pers di Harian Umum Kompas dan Surat Kabar Harian Radar Lampung tentang peran DPRD Provinsi Lampung?

5. Bagaimana sikap Harian Umum Kompas dan Surat Kabar Radar Lampung yang di tulis dalam tajuk rencana atau editorial yang berkaitan peran DPRD Provinsi Lampung?
Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kontrol pers dalam bentuk penyajian berita-berita di Harian Umum Kompas dan Surat Kabar Radar Lampung terhadap peran DPRD Provinsi Lampung dengan agenda pemilihan Gubernur Lampung tahun 2002, serta pembahasan dan penetapan APBD tahun 2003. Secara spesifik bertujuan untuk:


4. Mengkaji tanggapan pimpinan DPRD Provinsi Lampung melalui pers tentang agenda tersebut.

5. Mengkaji sikap Harian Umum Kompas dan Surat Kabar Radar Lampung yang di tulis dalam tajuk rencana atau editorial yang berkaitan dengan peran

Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai dua kegunaan, yaitu kegunaan ilmiah dan kegunaan praktis.

Kegunaan ilmiah:

2. Menambah perbendaharaan karya ilmiah dibidang komunikasi, tentang kontrol pers terhadap peran DPRD, yang ditempuh dengan pendekatan metode analisis isi media massa surat kabar.

Kegunaan Praktis:
1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang peran kontrol pers dan kalangan masyarakat (Civil Society) dalam hal ini Harian Umum Kompas dan Surat Kabar Radar Lampung terhadap peran DPRD Provinsi Lampung.

2. Bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak pengelola surat kabar sebagai alternatif kebijakan dan perancangan menu media massa surat kabar dalam menjalankan fungsi kontrol-nya.
Batasan Masalah

Pelaksanaan kontrol dibatasi pada tugas dan wewenang DPRD yaitu:

1. Pencalonan dan pemilihan Gubernur Lampung Desember 2002

TINJAUAN PUSTAKA

Fungsi Kontrol dan Pengawasan oleh Pers


Pengawasan oleh pers dapat dibaca atau diikuti oleh semua orang yang dapat membaca. Hal ini dapat menimbulkan dampak psikologis yang berbeda pada pihak yang diperiksa/diamati. Kasus penyelewengan yang dimuat oleh pers akan menimbulkan dampak psikologis lebih berat bagi pejabat (orang) yang terkena, karena dapat diketahui oleh pembaca dalam jumlah relatif besar. Dengan segala daya dan pengaruh kekuasaannya, tidak mustahil pejabat yang bersangkutan melampiaskan rasa dendam dengan melakukan tindakan merugikan pers, yang membeberkan kelemahan/kesalahannya.

Pengawasan oleh pers biasanya dilakukan oleh satu atau dua orang wartawan, dengan hanya memperhatikan salah satu bidang kegiatan, untuk waktu-waktu tertentu, yang tidak dapat diperhitungkan oleh objek yang diawasi. Laporan
hasil pengamatan wartawan biasanya dituntut oleh kecepatan waktu dan menempuh tahapan yang relatif sederhana untuk ditetapkan perlu dimuat atau tidak.


Lebih rinci pengawasan oleh pers adalah:

a. Pengawasan oleh pers dilakukan oleh masyarakat dan wartawan

b. Pengawasan oleh pers terdapat di dalam Undang-undang tentang pers

c. Pengawasan oleh pers adalah hak

d. Wartawan dan masyarakat hanya dapat mengadakan pengumpulan fakta atau informasi dengan melakukan wawancara atau kegiatan peliputan, yang dibatasi oleh berbagai norma dan kesempatan. Keadaan tersebut tentunya berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan dan pengamatan

e. Pengawasan oleh pers, dapat dibaca oleh publik (semua orang). Hal ini dapat menimbulkan beban psikologis bagi orang yang dipublikasikan bila bersalah

f. Pengawasan oleh pers biasanya dilakukan oleh satu atau dua orang wartawan, yang hanya memperhatikan salah satu bidang kegiatan
g. Laporan hasil pengamatan wartawan biasanya dituntut oleh ketepatan waktu dan menempuh tahapan yang relatif singkat untuk ditetapkan perlu di mutu atau tidak.

Apa yang dilakukan oleh pers di dalam melakukan peran kontrol dan pengawasannya adalah merupakan hak yang diatur di dalam Undang-undang. Sistem kerja yang dilakukan oleh pers dalam melaksanakan tugasnya mengacu kepada mekanisme keredaksian, sesuai dengan aturan jurnalistik.

Sementara itu Buku Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia jilid II/edisi ketiga Lembaga Administrasi Negara, antara lain menyatakan, bahwa pengawasan dapat dibedakan menurut subjek yang melakukan pengawasan dapat dibedakan menjadi 4 macam pengawasan:

1. Pengawasan melekat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap bawahan dan satuan kerja yang dipimpinnya.

2. Pengawasan fungsional (wasnal), ialah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang bertugas pokok melakukan pengawasan, seperti Inspektorat Jenderal, Inspektorat Wilayah (sekarang Badan Pengawas Daerah=Bawasda), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).


4. Pengawasan oleh masyarakat (wasmas), ialah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat seperti yang dimuat di dalam surat kabar.
Fungsi Utama Pers

Harold Lasswell dalam Basuki (1995) ada tiga fungsi utama pers dalam masyarakat modern yaitu:

1. Survailansi/Pengamatan adalah, melaporkan peristiwa yang sedang terjadi. Fungsi ini terbagi menjadi survailansi umum (Public surveillance) dan survailansi pribadi (private surveillance). Dalam survailansi umum pers berfungsi menentukan agenda tentang masalah dan kegiatan umum yang berkrena dengan orang, organisasi dan peristiwa tertentu yang akan menjadi bahan perhatian khalayak keseluruhan dan menciptakan kegiatan politik pada komunitas politik yang bebas. Melalui survailansi pribadi pers berfungsi sebagai sarana pengamat (penglihat dan pendengar) yang melaporkan keadaan sekitar seperti ekonomi, cuaca, olahraga, pekerjaan, peristiwa sosial, budaya, dan kesehatan serta kehidupan umum dan pribadi orang terkenal.

2. Interpretasi, pers berfungsi sebagai interpreter karena pers menafsirkan makna peristiwa, memasukannya ke dalam konteks, dan mempertimbangkan konsekuensinya.

3. Sosialisasi berarti bahwa pers berfungsi memasyarakatkan individu dalam latar budayanya. Melalui informasi media, terdapat proses yang melibatkan pengetahuan nilai-nilai dan orientasi dasar yang dapat mempersiapkan individu sesuai dengan lingkungan budayanya.
Pers di Indonesia dimasa refomasi berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh pers yang kuat dalam mencari, mengumpulkan, dan menyebarankan informasi, membuatnya dijuluki Lembaga Keempat (the fourth estate) atau cabang keempat pemerintah (the fourth estate government). (Basuki, 1995).

Istilah lembaga keempat adalah tambahan dari tiga lembaga yang ada yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Annenberg dalam Basuki (1995) menyatakan, pers sebagai lembaga keempat merupakan institusi yang dianggap sejajar dengan ketiga lembaga yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Istilah ini sebenarnya hanyalah citra yang muncul dari kalangan pers sendiri yang merasa bahwa pers merupakan institusi penting dan berpengaruh terhadap ketiga lembaga diatas.

Disebutnya sebagai lembaga keempat karena adanya kekuatan, besarnya peranan, dan pengaruh pers terhadap jalannya kehidupan bernegara, seperti mempunyai otonomi, mengawasi pemerintah, mengungkapkan penyelewengan, menggerakkan, mendidik, menyumbang informasi dan pendapat untuk diskusi umum, mengkritik pemerintah, serta menjadi komunikator rakyat terhadap apa yang dikerjakan ketiga lembaga negara.
Pers, Masyarakat, dan Penguasa

Bagaimana pers menyampaikan pesan-pesannya kepada masyarakat dan penguasa, bagaimana penguasa menyikapi pers, sangatlah bergantung kepada struktur sosial dan politik yang melatarbelakanginya. Berdasarkan latar belakang tersebut Fried S Siebert, Theodore Peterson dan Wibur Scramm merumuskan empat teori pers yakni:

a. Teori Pers Otoritarian/Pers Otoriter


b. Teori Pers Libertarian/Pers Liberal


c. Teori Pers Tanggung Jawab Sosial

Teori ini mempunyai asumsi utama bahwa kebebasan mengandung di dalamnya suasana tanggung jawab yang sepadan. Pers sebagai lembaga yang mengontrol jalannya pemerintahan, juga mempunyai tanggungjawab terhadap
hasil investigasi atau laporannya. Menurut teori ini, hak menyatakan pendapat adalah hak moral yang ada aspek kewajibannya.

d. Teori Pers Soviet Komunis

Teori ini umumnya berada di negara-negara sosialis yang menganut paham komunis dan marxis, misalnya Cina, Rusia, Hongaria, dan Kroasia. Pers komunis terbentuk karena latar belakang pemerintahannya menitikberatkan kekuasaan tunggal, yaitu komunis, sedangkan wartawannya adalah orang-orang yang setia kepada partainya.

Karena adanya tuntutan dan perkembangan masyarakat berbagai negara, terutama negara-negara berkembang, dipandang perlu menambah dua teori lagi yakni teori media pembangunan dan teori media demokratik partisipan. (Mc, Quail, terj, 1999).

e. Teori Media Pembangunan

Dalam teori normatif ini terkandung aspek negatif dan positif. Aspek negatif menentang paham otokratis. Sedangkan aspek positifnya ialah memanfaatkan media secara positif dalam pembangunan. Ciri-ciri yang diharapkan ada pada media berdasarkan teori ini:

1. Media seyogyanya menerima dan melaksanakan pembangunan sejalan dengan kebijakan nasional.

2. Media hendaknya memprioritaskan berita atau informasi pada negara-negara sedang berkembang lainnya yang memiliki kaitan erat secara geografi, politis, dan kultural.
3. Bagi kepentingan tujuan pembangunan, negara mempunyai hak untuk melakukan campur tangan dalam pengoperasian media dan melakukan pengendalian langsung.

4. Para wartawan dan karyawan media lainnya memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam tugas mengumpulkan informasi dan penyebarannya.

Dalam Teori media pembangunan ini Wilbur Scramm memberikan batasan sebagai berikut:

1. Pers harus dapat menciptakan iklim pembangunan di negaranya.

2. Pers harus mampu memperluas pandangan atau cakrawala bagi masyarakatnya.

3. Pers harus mampu mengarahkan perhatian masyarakat dari kebiasaan lama menjadi perilaku yang lebih maju.

4. Pers harus dapat meningkatkan aspirasi dan mendorong masyarakatnya berpola pikir ke arah kehidupan yang lebih baik.

5. Pers harus memperlebar tukar pikiran (dialogue) dan kebijakan (policy).


7. Pers harus mampu membantu secara substansial dari semua jenis kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Teori Media Demokratik Partisipan

Prinsip-prinsip yang dirumuskan untuk teori ini antara lain sebagai berikut:
1. Individu dan kelompok warga negara memiliki hak pemanfaatan media.

2. Organisasi dan isi media seyogyanya tidak tunduk pada pengendalian politik yang berpusat, atau pengendalian oleh birokrasi media sendiri.


Di Indonesia teori pers di kenal pula dengan adanya teori Pers Pancasila (Five Foundation Press) (Djuroto,2000).

pers Pancasila (Five Foundation Press)


mampu menjalankan peran dan fungsinya sebagai kontrol bagi jalannya pemerintahan.

Berita

Pengertian Berita

Berita berasal dari bahasa sangsekerta, yakni Vrit yang di dalam Bahasa Inggris disebut Write, artinya sebenarnya ada atau terjadi. Sebagian ada yang menyebut dengan Vritta, artinya kejadian atau yang telah terjadi. Vritta dalam Bahasa Indonesia menjadi berita atau warta.

Suronto dan Lopulalan (2002) mendefinisikan berita adalah:

- Informasi hangat yang disajikan kepada umum mengenai apa yang sedang terjadi
- Berita adalah sesuatu yang menarik perhatian sebagian besar komunitas
- Berita adalah informasi mengenai peristiwa atau ide yang menarik perhatian dan mempengaruhi kehidupan manusia
- Berita adalah sesuatu di luar yang biasa.

Syarat-syarat yang Menentukan Nilai Berita

Suronto dan Lopulalan (2002) menyatakan ada delapan syarat yang menentukan nilai suatu berita antara lain:

1. *Timelines* (kebaruan/aktual)

   Waktu merupakan nilai berita yang sangat penting. Berita adalah sekarang. Berita adalah sesuatu yang baru, sedang berlangsung, dan seringkali adalah kelanjutan dari hari ini atau saat sebelumnya.

2. *Significance*

   Berkaitan dengan kejadian yang kemungkinan mempengaruhi kehidupan orang banyak, atau kejadian yang mempunyai akibat terhadap kehidupan pembaca. Setiap orang punya persepsi yang berbeda-beda mengenai hal yang penting mengenai dirinya. Walaupun demikian, nilai berita yang terkandung dalam kejadian menjadi magnet yang menyebabkan pembaca tertarik pada berita yang ditulis.

3. *Magnitude* (Berita berkaitan dengan hal-hal besar)

   Kejadian yang berkaitan dengan hal-hal besar secara kuantitatif, yang berarti bagi kehidupan manusia, akan menarik dan menggugah rasa ingin tahu pembaca.

4. *The Unusual* (Keanehan)


5. *Conflict* (Konflik)

   Peristiwa seperti perang, perkelahian, pergulatan dalam bidang politik, bisnis, olahraga, bahkan cinta sangat menarik minat pembaca.

7. *Prominence* (Cuatan/Kemenonjolan)

Hal-hal yang sangat terkenal atau sangat dikenal oleh pembaca seperti, orang, benda, atau tempat memiliki nilai berita tinggi.

8. *Human Interest* (Daya Tarik Kemanusiaan)

Kejadian yang memberikan sentuhan perasaan bagi pembaca, kejadian yang menyangkut orang biasa dalam situasi luar biasa, atau orang besar dalam situasi biasa, menarik perhatian pembaca.

**Jenis Berita**

Menurut Romli (2000), jenis-jenis berita yang dikenal dalam dunia jurnalistik adalah:


b. *Dept News* adalah berita mendalam, dikembangkan berdasarkan dengan penelitian hal-hal yang ada di bawah suatu permukaan.

c. *Investigation News* adalah berita yang dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber.

d. *Interpretative News* adalah berita yang dikembangkan dengan pendapat atau penilaian penulisnya/reporter.
e. *Opinion News* adalah berita mengenai pendapat seseorang, biasanya pendapat pakar bidang ilmu tertentu, cendikiawan, tokoh, atau pejabat.

Adapun susunan atau struktur berita, khususnya berita langsung (*Straight News*), pada umumnya mengacu pada struktur piramida terbalik (*Interved Pyramid*), yaitu memulai penulisan berita dengan mengemukakan bagian berita yang dianggap paling penting, kemudian diikuti dengan bagian-bagian yang dianggap penting, kurang penting, dan seterusnya.

**Sumber Informasi**


Burnet dalam Munthe (1993), menyebutkan bahwa ada tiga cara mencari informasi bagi wartawan, yaitu mengamati kejadian, menanyakan kepada orang lain (pengamat, pakar, dan pelaku) dan membaca bahan-bahan tulisan yang berkaitan dengan suatu masalah atau gagasan yang sedang dibahas.
Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber informasi atau berita ada tiga, yakni, (1) manusia, baik tokoh pemerintah atau tokoh masyarakat seperti pengamat, pakar, atau pelaku, (2) peristiwa, yaitu suatu kejadian atau penggambaran obyek dengan keterangan wartawan, (3) gabungan manusia dan peristiwa.

**Analisis Isi**


Penelitian yang menggunakan model analisis isi, perlu memperhatikan empat hal, yaitu unit analisis, konstruksi kategori, pemilihan contoh dan
keandalan (Stempel and Westley, 1981). Unit analisis merupakan unsur terkecil dari analisis isi yang akan dihitung untuk membuat sebuah kesimpulan. Unit analisis ini meliputi kata, tema, ciri atau karakter, kalimat, paragraf, artikel, butir, dan ukuran ruang dan waktu (Stempel and Westley, 1981).
KERANGKA PEMIKIRAN

Yudhoyono (2001) mengungkapkan, bahwa yang mengawasi DPRD adalah masyarakat (*Civil Society*). Jika ada anggota DPRD yang melakukan pelanggaran, penyimpangan, sikap dan perilakunya berindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), maka rakyat yang akan menghukum dan menegurnya. Lembaga-lembaga seperti *Parliament Watch* termasuk pers diberbagai daerah harus lebih diefektifkan.

Pers di tengah era kebebasan menyampaikan informasi diharapkan mampu melaksanakan peran kontrol dan pengawasannya terhadap DPRD sebagai salah satu lembaga negara yang ada di daerah selain eksekutif, dan yudikatif, yang ikut menentukan berlangsungnya pembangunan di daerah. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan pers yakni dengan melakukan liputan-liputan tentang DPRD yang kemudian dikemas dalam bentuk berita, yang dilaporkan kepada publik (masyarakat). Hal tersebut dilakukan dengan harapan adanya transparansi dan kinerja yang baik dari kalangan DPRD guna menunjang pembangunan daerah.

Peran pers dan masyarakat (*Civil Society*) sebagai kontrol sosial di daerah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, sangat menentukan dalam proses pembangunan di daerah guna tercapainya cita-cita otonomi daerah yakni pembangunan dan pemberdayaan ekonomi rakyat, serta cita-cita reformasi secara menyeluruh termasuk di dalamnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial.
Apalagi saat ini, setelah reformasi digulirkan oleh mahasiswa ketentuan penyelegaraan pers telah mengalami perubahan dengan disempurnakannya Undang-undang tentang Pers Nomor 21 Tahun 1982 menjadi Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Pers. Ketentuan dalam Undang-undang tersebut memberikan ruang dan kemerdekaan bagi pers seperti yang diatur pada Pasal 4 yakni:

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran.
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan meyebarluaskan gagasan dan informasi.
4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.

Sementara itu Pasal 6 menyatakan pers nasional:

1. Merienuhi hak masyarakat untuk mengetahui
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati Kebhinekaan
3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar
4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran, terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum
5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
Aturan hukum yang ada tersebut sangat jelas menyebutkan bahwa kemerdekaan pers merupakan aturan hukum yang telah dituangkan di dalam Undang-undang. Kemerdekaan pers berarti tidak ada campur tangan pemerintah terhadap pengaturan, pemaksakan, penyensoran, pembredelan dan pelarangan penyiaran. Bahkan sangat jelas menyatakan bahwa pers memainkan peranan penting di dalam melakukan kontrol sosial, kritik, koreksi, dan pengawasan serta saran untuk kepentingan umum. Gambar 1 menunjukkan kerangka konseptual fungsi kontrol oleh pers dan proses pengolahan berita:
Gambar 1. Kerangka Fungsi kontrol Pers dan Proses Pengolahan berita
Bidang redaksi bertugas mengisi surat kabar dengan berita dan pendapat yang manarik perhatian pembaca dan bermanfaat baginya. Tugas ini dapat dibagi dalam tiga bagian menurut sifat pekerjaannya, sebagai berikut:

1. Mencari dan mengumpulkan bahan berita dan bahan pendapat dari sumber berita dan sumber pendapat lalu menyusunnya menjadi naskah berita atau pendapat
2. Mengolah berita dan pendapat serta mengukur penempatannya dalam halaman-halaman surat kabar
3. Mengurus administrasi, dokumen dan perpustakaan untuk memudahkan pelaksanaan tugas keredaksian.

Dalam pekerjaannya mencari berita, wartawan media massa termasuk surat kabar banyak menemui sumber berita. Tidak semua berita yang berhasil diperoleh wartawan dapat dimuat atau disiarkan melalui media massa, tetapi harus melalui proses seleksi (gatekeeping) dari redaksi media yang bersangkutan. Masing-masing redaksi media massa memiliki kebijakan redaksional yang berbeda untuk menentukan apakah suatu berita layak atau tidak untuk dipublikasikan. Proses gate keeping dan kebijakan redaksional yang berbeda ini akan menyebabkan adanya perbedaan dalam memberitakan suatu peristiwa. Gambar 2 menunjukan kerangka kerja operasional (kerangka pemikiran) dari penelitian ini:
Gambar 2. Kerangka Pikir Operasional Kontrol Pers Terhadap DPRD
METODOLOGI PENELITIAN

Disain Penelitian


Dalam penelitian ini digunakan juga metode kualitatif (survey dan wawancara) untuk mengetahui jawaban yang tidak terjawab dengan menggunakan metode analisis isi. Ini merupakan data pelengkap sekaligus untuk memperkaya tulisan dalam penelitian ini. Adapun metode kualitatif (survey dan wawancara) digunakan untuk menjawab tanggapan dari pimpinan DPRD Provinsi Lampung melalui pers tentang pemberitaan Harian Umum Kompas dan Surat Kabar Radar Lampung, serta sikap yang ditulis Harian Umum Kompas dan Surat Kabar Radar Lampung di dalam tajuk rencana atau editorial.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah semua berita atau tulisan tentang DPRD Provinsi Lampung yang ada di Harian Umum Kompas dan Surat Kabar Harian Radar Lampung. Dipilihnya dua surat kabar ini sebagai lokasi penelitian
karena hasil *Survei Nielsen Media Research* terhadap jumlah pembaca di delapan surat kabar yang beredar di Lampung yaitu: Radar Lampung, Lampung Post, Lampung Ekspress (koran lokal Lampung), Kompas, Media Indonesia, Harian Tempo, Rakyat Merdeka, dan Lampu Merah (koran nasional) pada tahun 2002 di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa Surat Kabar Harian Radar Lampung (koran lokal) memiliki pembaca paling banyak (peringkat pertama) di Provinsi Lampung dengan jumlah pembaca 60.000 pembaca. Sedangkan Harian Umum Kompas sebagai media nasional sebanyak 16.000 pembaca (urutan pertama koran nasional). (Radar Lampung, 3 maret 2003).

Pengumpulan Data


Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas berhubungan dengan ketepatan alat ukur. Dalam reliabilitas kategori ditujukan kepada derajat kemampuan pengulangan penempatan data dalam berbagai kategori yang secara integral berhubungan dengan pemberi kode (juri). Menurut Krippendorf (1991) tujuan pengujian kehandalan (reliabilitas) adalah memantapkan apakah data yang diperoleh dalam penelitian dapat memberikan suatu dasar yang dapat dipercaya untuk menarik inferensi, membuat rekomendasi, mendukung keputusan atau menerima sesuatu fakta.


Adapun langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut:

1. Ketiga juri diminta untuk menilai setiap butir berita berdasarkan pemahamannya terhadap kategori yang ada.

2. Hasil penilaian juri dihitung dengan menggunakan Rumus Holsty dalam Wimmer dan Dominick, untuk menemukan koefisien keandalan antar juri, dengan rumus:

\[
3M
\]
\[
\text{Koefisien Kehandalan} = \frac{3M}{N_1+N_2}
\]

Keterangan :

\[
3 = \text{Jumlah Juri (coder)}
\]

\[
M = \text{Jumlah Kesepakatan}
\]

\[
N_1, N_2 = \text{Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh juri}
\]

Dari hasil yang diperoleh, akan ditemukan nilai koefisien keandalan. Untuk penyempurnaan dan memperkuat hasil uji reliabilitas, maka dilanjutkan dengan menghitung nilai keterhandalan majemuk (Composite Reliability) dengan rumus berikut:

\[
\text{Keandalan Majemuk} = \frac{N (\text{koefisien keandalan})}{1+ (N-1)(\text{koefisien keandalan})}
\]

Keterangan :

\[
N = \text{Jumlah juri}
\]

Besarnya penilaian juri tersebut dapat menunjukan kesepakatan antarjuri dalam menentukan, apakah kategori yang disusun dapat dipergunakan.
Uji Kategori yang dilakukan oleh tiga orang juri dipadukan dan dibandingkan terhadap berita/tulisan Harian Umum Kompas dan Surat Kabar Radar Lampung. Hasil perhitungannya sebagai berikut:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Juri Ke-1</th>
<th>Juri Ke-II</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Juri Ke-III</td>
<td>0,8585</td>
<td>0,9292</td>
</tr>
<tr>
<td>Juri Ke-II</td>
<td>0,8080</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Nilai rata – rata = 0,8652

\[
\text{Keandalan Majemuk} = \frac{3 \times 0,8652}{1 + (2 \times 0,8652)} = 0,9506
\]

Hasil menunjukan bahwa kesepakatan antarjuri tinggi, yaitu 0,9506 (95%). Menurut Krippendorf (1991) nilai kesepakatan antarjuri yang lebih dari 0,8 (80%), data terandalkan.

Tabel 2 Koefisien Reliabilitas Antarjuri untuk Kategori Sumber Informasi

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Juri Ke-1</th>
<th>Juri Ke-II</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Juri Ke-III</td>
<td>0,7171</td>
<td>0,8383</td>
</tr>
<tr>
<td>Juri Ke-II</td>
<td>0,7373</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Nilai rata – rata = 0,7642

\[
\text{Keandalan Majemuk} = \frac{3 \times 0,7642}{1 + (2 \times 0,7642)} = 0,9067
\]

Hasil menunjukan kesepakatan antarjuri tinggi, yaitu 0,9067 (90%). Nilai kesepakatan antarjuri tinggi, sehingga data terandalkan.
Tabel 3. Koefisien Reliabilitas Antarjuri untuk Kategori Nilai Berita:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Juri Ke-I</th>
<th>Juri Ke-II</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Juri Ke-III</td>
<td>0,7171</td>
<td>0,6969</td>
</tr>
<tr>
<td>Juri Ke-II</td>
<td>0,7474</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Nilai rata – rata = 0,7204

Keandalan Majemuk = \[\frac{3 \times 0,7204}{1 + (0,7204)} = 0,8854\]

Hasil menunjukkan kesepakatan antarjuri tinggi, yaitu 0,8854 (88%). Nilai kesepakatan antarjuri tinggi, sehingga data terandalkan.

Tabel 4. Koefisien Reliabilitas Antarjuri untuk Kategori Tingkat Keakuratan:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Juri Ke-I</th>
<th>Juri Ke-II</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Juri Ke-III</td>
<td>0,9494</td>
<td>0,8686</td>
</tr>
<tr>
<td>Juri Ke-II</td>
<td>0,7979</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Nilai rata – rata = 0,8719

Keandalan Majemuk = \[\frac{3 \times 0,8719}{1 + (2 \times 0,8719)} = 0,9533\]

Hasil menunjukkan kesepakatan antarjuri tinggi, yaitu 0,9533 (95%). Nilai kesepakatan antarjuri tinggi, sehingga data terandalkan.
Tabel 5. Koefisien Reliabilitas Antarjuri untuk kategori Tanggapan Pimpinan DPRD

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Juri Ke-1</th>
<th>Juri Ke-II</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Juri Ke-III</td>
<td>0,7979</td>
<td>0,7070</td>
</tr>
<tr>
<td>Juri Ke-II</td>
<td>0,6666</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Nilai rata – rata = 0,7238

\[
\text{Keandalan Majemuk} = \frac{3 \times 0,7238}{1 + (2 \times 0,7238)} = 0,8872
\]

Hasil menunjukkan kesepakatan antarjuri tinggi, yaitu 0,8872 (88%). Nilai kesepakatan antarjuri tinggi, sehingga data terandalkan.


<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Juri Ke-1</th>
<th>Juri Ke-II</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Juri Ke-III</td>
<td>0,6666</td>
<td>1,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Juri Ke-II</td>
<td>1,00</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Nilai rata – rata = 0,8889

\[
\text{Keandalan Majemuk} = \frac{3 \times 0,8889}{2 + (2 \times 0,8889)} = 0,9600
\]

Hasil menunjukkan kesepakatan antarjuri tinggi, yaitu 0,96 (96%). Nilai kesepakatan antarjuri tinggi, sehingga data terandalkan.
Analisis Data

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif untuk mengetahui frekuensi dan volume jenis berita, frekuensi sumber informasi, nilai berita, tingkat akurasi berita, tanggapan pimpinan DPRD melalui pers, dan sikap pers dalam tajuk rencana atau editorial, maka prosedur statistik yang digunakan untuk menganalisis data perolehan bersifat deskriptif dengan menggunakan tabel. Setiap jumlah frekuensi maupun volume masing-masing kategori data pada tabel, dipersentasikan sehingga dapat diketahui jenjang masing-masing kategori.

Metode analisis isi (Content Analisis) digunakan untuk menganalisis volume dan frekuensi jenis berita yang dikategorikan menjadi berita langsung (straight news), berita investigasi (investigation news), dan Opini (opinion news). Menganalisis frekuensi untuk kategori sumber informasi yaitu pakar/akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), mahasiswa, dan tokoh agama/masyarakat. Frekuensi nilai berita digunakan penilaian positif atau negatif. Tingkat akurasi berita, digunakan kategori kesesuaian judul, pencantuman waktu, penggunaan informasi pendukung dan faktualitas berita. Tanggapan pimpinan DPRD menggunakan data apakah pers meminta tanggapan atau hak jawab dari pimpinan DPRD untuk melihat kesesuaian berita dan respon dari pimpinan DPRD Provinsi Lampung. Sedangkan untuk sikap pers yang ditulis di dalam tajuk rencana atau editorial dilihat dari netral atau tidak netral pers menyampaikan tulisan.

Untuk mendapatkan data-data diatas digunakan kategori sebagai berikut :

1. Jenis berita
   b. Berita investigasi (*investigation news*) adalah berita yang dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber.
   c. Opini (*opinion news*) adalah berita mengenai pendapat seseorang, biasanya pendapat pakar bidang ilmu tertentu, cendikiawan, tokoh, atau pejabat.
2. Sumber informasi
   a. Pakar/Akademisi adalah orang yang ahli pada suatu bidang tertentu, umumnya adalah kalangan perguruan tinggi atau kalangan kampus.
   b. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi non pemerintah (Ornop) yang ikut mengawasi jalannya pemerintahan.
   c. Mahasiswa adalah semua elemen-elemen organisasi di tingkat mahasiswa (Ormawa) baik intra maupun ekstra kampus dari berbagai perguruan tinggi.
   d. Tokoh Agama/Masyarakat adalah orang-orang panutan di masyarakat dari kalangan agama maupun adat.

3. Nilai berita
4. Tingkat Keakuratan berita

a. Akurasi Pemberitaan, yaitu menyangkut kejujuran dalam pemberitaan yang meliputi kesesuaian judul berita dengan isi berita. Ini menyangkut aspek relevansi, yaitu apakah kalimat judul merupakan bagian dari kalimat yang sama pada isi berita, atau apakah judul jelas-jelas ada dalam isi berita. Konsep ini dibagi dua kategori:

- Sesuai, apabila judul merupakan bagian dari kalimat yang sama pada isi berita atau kutipan yang jelas-jelas ada dalam isi berita.

- Tidak sesuai, apabila judul bukan merupakan bagian dari kalimat yang sama pada isi berita atau bukan kutipan yang jelas-jelas ada dalam isi berita.

b. Pencantuman waktu terjadinya peristiwa atau wawancara untuk melihat akurasi fakta atau opini. Ada dua kategori dalam konsep ini, yaitu:

- Dicantumkan waktu, apabila dalam tulisan mencantumkan waktu berupa tanggal, kata-kata atau pernyataan tentang waktu atau keduanya, yaitu mencantumkan tanggal dan kata-kata.

- Tidak dicantumkan waktu, apabila dalam tulisan tidak mencantumkan baik tanggal ataupun kata-kata yang berkaitan dengan waktu.
c. Penggunaan data pendukung atau kelengkapan informasi atas berita yang ditampilkan berupa tabel, statistik, foto, ilustrasi gambar, dan lain-lain. Konsep ini dibagi dua, yaitu:

- Ada data pendukung, yaitu apabila tulisan itu dilengkapi dengan salah satu data pendukung, seperti foto peristiwa, tabel, statistik, dan data referensi (buku, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dll).

- Tidak ada data pendukung, yaitu apabila tulisan itu sama sekali tidak dilengkapi dengan data pendukung, seperti foto peristiwa, tabel, statistik, dan data referensi (buku, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dll).

d. Faktualitas berita, yaitu menyangkut ada tidaknya pencampuran fakta dengan opini wartawan yang menulis berita. Konsep ini dibagi dua, yaitu:

- Ada pencampuran fakta dan opini, yaitu apabila dalam berita terdapat kata-kata yang bersifat opini, seperti: tampaknya, diperkirakan, diramalkan, kontroversi, mengejutkan, manuver, dan kata-kata yang bersifat opini lainnya.

- Tidak mencampur fakta dan opini, yaitu jika dalam tulisan berita tersebut tidak terdapat kata-kata yang bersifat opini seperti yang telah disebutkan diatas.
5. Tanggapan pimpinan DPRD Provinsi Lampung

6. Sikap Pers dalam Tajuk Rencana atau Editorial

7. Pencalonan dan Pemilihan Gubernur adalah suatu proses pergantian pimpinan daerah yang dilakukan oleh DPRD sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang melakukan tugas tersebut. Proses pencalonan dan pemilihan yang diamati dalam penelitian ini meliputi aspek-aspek :
b. Proses Pemilihan (Sidang Paripurna) adalah pelaksanaan pemilihan Gubernur Provinsi Lampung tahun 2002 yang digelar dalam sidang paripurna.

c. Penyalahgunaan Wewenang/Penyimpangan Perangkat Hukum dalam Sidang adalah kesalahan-kesalahan prosedur atau aturan hukum yang dilakukan oleh pimpinan dan atau anggota dewan berkaitan dengan proses pemilihan.

d. Kemungkinan melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme adalah adanya indikasi pimpinan dan anggota dewan melakukan tindakan politik uang (money politic) dalam suksesi kepemimpinan Gubernur Provinsi Lampung tahun 2002.

Sedangkan untuk pembahasan dan penetapan APBD tahun 2003 dilihat dari aspek-aspek :

a. Pembahasan APBD bidang pertanian dan pedesaan yakni perhatian pimpinan DPRD Provinsi Lampung terhadap pembangunan di bidang pertanian dan pedesaan yang tercermin dari besarnya anggaran yang diupayakan pimpinan DPRD Provinsi Lampung terhadap bidang tersebut.


c. Pembahasan APBD bidang pendidikan yakni perhatian pimpinan DPRD Provinsi Lampung terhadap pembangunan di bidang pendidikan yang tercermin dari besarnya anggaran yang diupayakan pimpinan DPRD Provinsi Lampung terhadap bidang tersebut.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Harian Umum KOMPAS

Sejarah Harian Umum KOMPAS

Kelahiran KOMPAS bermula dari lemparan ide Letnan Jenderal Ahmad Yani (Menteri/Panglima Angkatan Darat 1962-1965) kepada rekannya, Frans Seda (Menteri Perkebunan 1964-1966) untuk menerbitkan koran yang mampu melawan pers komunis. Ide tersebut juga bermula dari sebuah usul agar kalangan Khatolik memiliki satu harian untuk mengimbangi media PKI.

KOMPAS juga lahir atas desakan Presiden Soekarno pada Partai Khatolik untuk menerbitkan koran karena pada masa itu hampir semua partai politik telah menerbitkan koran “menyuarakan perjuangan partai”. Partai Khatolik kemudian memutuskan menerbitkan koran dengan membentuk Yayasan Bentara Rakyat yang anggotanya terdiri dari unsur hirarkhi (pemuka Agama Khatolik), Pemimpin Partai Katolik, dan PMKRI. Pimpinan Partai Khatolik mendesak P.K. Ojong dan Jacob Oetama untuk menjadi project officer yang membangun perusahaan yang menerbitkan Koran Kompas karena sebelumnya mereka telah berhasil menerbitkan majalah “Intisari”.

Kompas semula bernama “Bentara Rakyat” dengan maksud sebagai counter terhadap dominasi penggunaan kata rakyat oleh hampir semua koran, penerbitan dan organisasi dibawah PKI. Menjelang Bentara Rakyat terbit, Presiden Soekarno melalui Seda sebagai Menteri Perkebunan, yang waktu itu datang ke istana untuk keperluan dinas, menyarankan pemberian nama KOMPAS pada Bentara Rakyat, dengan argumentasi, koran tersebut dapat menjadi petunjuk arah. Sementara Bentara Rakyat merupakan nama yayasan yang bertindak sebagai penerbit harian KOMPAS.


Halaman III berisi tiga artikel, satu diantaranya mengenai luar negeri. Ada pula ulasan mengenai penyakit ayam dari Dokter Kompas. Sedangkan halaman IV memuat berita dan dua artikel luar negeri, serta satu artikel dalam negeri. Di halaman ini tercatat dua berita olah raga, satu diantaranya mengenai “Persiapan Tim PSSI ke Pyongyang”.

Pemasangan iklan masih kurang dari setengah halaman. Dari enam iklan, satu diantaranya dari redaksi Kompas tentang “Permintaan menjadi langganan Kompas”. Iklan yang paling besar dan bergambar ada dua yaitu iklan obat batuk dan obat cacing.

Berdasarkan penampilan wajah Kompas edisi perdana, tatanan wajahnya tidak karuan, gambarnya kurang jelas dan sama sekali belum memiliki tambahan pernik-pernik untuk mempercantik diri. Tidak seorangpun aktivis perintis Kompas merasa optimis Kompas akan berusia panjang karena dibanding dengan surat khabar lainnya, penampilan Kompas kurang bersaing. Tetapi dibalik segala keterbatasan serta kekurangan tersebut, para pengelolanya dipacu untuk terus menerus memperbaiki penulisan sebagai satu-satunya peluang untuk tetap memperbaiki perwajahan Kompas agar lebih baik, dan mampu membuka peluang merebut pasar. Kegigihan dan semangat tidak kenal menyerah, pada akhirnya terbukti dapat mendorong Harian Umum Kompas tetap eksis sampai hari ini.

yang terbit di Jakarta lainya, yaitu: Merdeka, Sinar Harapan, Pelita, Pos Kota, Pos Sore, Indonesia Times, dan Sinar Pagi dilarang terbit oleh Kopkamtib. Alasan yang melatarbelakangi tindakan kopkamtib untuk melarang terbit surat kabar Jakarta tersebut adalah karena adanya pemberitaan yang dapat mengancam ketertiban dan keamanan, seperti pemberitaan tentang tindakan unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa di berbagai kampus.


Meskipun pada awalnya, Kompas hanya berbekal modal, fasilitas, peralatan kantor yang minim serta kantor tumpangan, Kompas dapat mencapai kesuksesan dalam perkembangannya. Kesuksesan Kompas yang disebut "trisukses" meliputi (1) sukses dalam mengembangkan diri menjadi surat kabar kebanggaan nasional, (2) sukses sebagai harian yang berkualitas, besar kuantitasnya, dan terpercaya profesionalismenya serta (3) sukses dalam bisnis.

Kompas memiliki motto “Amanat Hati Nurani Rakyat”. Motto tersebut merupakan hasil pilihan dan renungan mendalam atas kondisi saat berdirinya Kelahiran Kompas merupakan suatu upaya pembebasan kondisi hati nurani yang tersumbat akibat manipulasi PKI dan kawan-kawannya.


yang merupakan lembaga internasional yang dibentuk bersama oleh para penerbit dan pemasang iklan serta biro iklan. Fungsi lembaga ini mencatat dan menyebarluaskan angka sirkulasi yang riil dari para anggotanya.


Visi dan Misi Kompas

PT. Kompas Media Nusantara memiliki raison d’être yaitu menjadi hati nurani rakyat, mencerdaskan bangsa, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat (termasuk usaha mengurangi pengangguran). Kelompok Kompas Gramedia (KKG) memiliki nilai-nilai dasar, yang digunakan untuk melakukan seluruh kegiatan dan keputusan yakni: (1) menghargai manusia dan nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan harkat dan martabatnya, (2) mengutamakan watak baik, (3) profesionalisme, dan (4) semangat kerja tim, (5) Berorientasi pada
kepuasaan konsumen (pembaca, pengiklan, mitra kerja-penerima proses selanjutnya), (6) tanggungjawab sosial, dan (7) bertingkah laku mengikuti nilai-nilai tersebut, sehingga dapat memberikan pelayanan memuaskan bagi pelanggan.

Sedangkan Visi Kelompok Kompas Gramedia (KKG), penerbit Kompas, ialah menjadikan institusi yang memberikan pencerahan bagi perkembangan masyarakat Indonesia yang demokratis dan bermartabat, serta menjunjung tinggi asas dan nilai kemanusiaan. Sementara misi KKG ialah mengantisipasi dan merespon dinamika masyarakat secara professional, sekaligus memberi arah perubahan (Trend Setter) dengan menyediakan dan menyebarluaskan informasi yang terpercaya.

Gambaran Umum Surat Kabar Radar Lampung

Sejarah Surat Kabar Radar Lampung

Surat Kabar Radar Lampung bermula dari kelahiran Harian Bhayangkara (4 Oktober 1968) yang secara resmi diterbitkan oleh Komando Antar Resort Kepolisian Lampung (Skomdinum Kepolisian Lampung) dalam bentuk bulletin stansilan. Buletin ini terbit 2 Minggu sekali (dwi Mingguan) di bawah pengelolaan Yayasan Bhayangkara, yang kepengurusanannya rata-rata ditangani oleh staf kepolisian

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Penerbitan Pers terhitung mulai tanggal 18 Juni 1975, maka pengelola surat kabar yang tadinya adalah bernama Yayasan Bhayangkara diubah menjadi PT Tamtama Jaya, akibatnya nama surat kabar yang sebelumnya Bhayangkara juga berganti nama menjadi Harian Tamtama. Secara yuridis formal surat kabar ini berdiri sendiri sebagai


Selama perjalanannya, penerbitan Harian Tamtama yang bermotto "Pembawa Citra Pancasila dan UUD 1945" dan dengan motto pengelola yaitu "Tamtama Memang Kecil Tapi Penting Dibaca" sudah berulang kali terjadi pergantian (penyelegaraan) susunan keredaksian maupun pindah markas. Namun Percetakan masih di CV. Ganesha Baru yang sesungguhnya bukan merupakan percetakan pers.


Perjalanan Lampung Ekspress pernah mengalami hambatan dan adanya ketidakcocokan antara pengurus redaksi/manajemen dan pemodal, yaitu Jawa Pos Group, yang memaksa revisi kerja sama yang telah dibina. Jawa Pos mengklaim


Radar Lampung merupakan harian pagi dengan skala pemberitaan; nasional 30%, daerah 60%, dan sisanya 10% adalah pemberitaan yang berkenaan dengan dunia internasional. Untuk pemberitaan yang berskala besar (nasional/internasional koran ini memanfaatkan fasilitas/jaringan berita Jawa Pos News Network (JPNN), sedangkan pemberitaan lokal (Propinsi Lampung) ditangani sendiri.


Sejak berdiri Februari 2000, Radar Lampung yang terbit dengan investasi awal 3 milyar terus berkembang dan memacu kualitas penerbitan. Aset yang dimiliki baik berupa percetakan maupun sarana operasional (teknis) lainnya, terus dikembangkan pemanfaatannya. Dengan aset yang dimiliki itu Radar Lampung berencana mengembangkan sayap menerbitkan koran baru dengan
segmentasi yang lebih spesifik. Melihat perkembangan pasar dan jumlah penduduk, Radar Lampung optimis mampu menerbitkan koran baru yang memberikan kontribusi lowongan pekerjaan.

Visi Misi Surat Kabar Radar Lampung

Koran ini menganut politik keredaksiannya, "Lugas Tanpa Prasangka dan Bebas Dari Pengaruh" semenjak berdiri (Februari) dipimpin oleh seorang praktisi pers yang ulet dan berpengalaman asal Bengkulu, Ardiansyah, SH. Sang lokomotif sendiri, yang sebetulnya berasal dari Lampung, sebelum memikul tanggungjawab mengelola Radar Lampung adalah insan pers yang selama ini memimpin Harian Semarak di Bengkulu-kini Rakyat Bengkulu (juga afiliasi Jawa Pos Group). Dibawah kepemimpinan sosok bertangan dingin inilah Radar Lampung terus menunjukan kemajuan seiring usia yang bertambah dan ketatnya persaingan dunia persurat kabaran di Provinsi Lampung.

Di tengah ketatnya persaingan memperebutkan pembaca potensial, membuat awak redaksi bekerja keras memperbaiki kualitas penerbitan yang ada selama ini. Usaha menjadikan Radar sebagai koran yang dicintai masyarakat terus diupayakan dari hari ke hari. Peningkatan kinerja dan mutu pemberitaan demi kepuasan pembaca, disamping peningkatan kesejahteraan karyawan/wartawan adalah salah satu upaya untuk tujuan tersebut.

Dalam penyajian berita walaupun di tengah kondisi euphoria bebasan seperti sekarang tidak serta merta membuat Radar Lampung memberikan penyajian yang asal-asalan. Tetap menerapkan prinsip dasar jurnalistik yakni keseimbangan (balancing) dan standar check, recheck, dan cross-check adalah
kunci koran ini menjadi media yang dicintai publik. Peningkatan etos kerja (profesionalisme) para wartawan, pelayanan akan informasi yang cepat, tepat, dan akurat pada masyarakat adalah tanggung jawab yang selalu dipikul dalam setiap langkah maju Radar Lampung.

**Kontrol Pers terhadap Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung**

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Peran DPRD</th>
<th>Kompas</th>
<th>Radar Lampung</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Frekuensi (kali)</td>
<td>Persentase (%)</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Pencalonan dan pemilihan gubernur 2002, aspek-aspek:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>a) Administrasi dan proses pencalonan</td>
<td>5</td>
<td>22,73</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>b) Proses pemilihan (Sidang Paripurna)</td>
<td>1</td>
<td>4,54</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>c) Penyalahgunaan wewenang/penyimpangan perangkat hukum dalam sidang</td>
<td>3</td>
<td>13,64</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>d) Kemungkinan melakukan Korupsi, kolusi, dan nepotisme</td>
<td>13</td>
<td>59,09</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Pembahasan dan penetapan APBD 2003, aspek-aspek:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>a) Pembahasan APBD bidang pertanian dan pedesaan</td>
<td>0</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>b) Pembahasan APBD bidang pendidikan</td>
<td>0</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>c) Penetapan APBD 2003</td>
<td>0</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Jumlah</strong></td>
<td><strong>22</strong></td>
<td><strong>100,00</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Berdasarkan penilaian juri, Tabel 7 menggambarkan sajian berita yang menyangkut aspek kemungkinan melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang ada di Harian Umum Kompas mencapai 13 berita (59,09%) dan merupakan sajian paling banyak, administrasi dan proses pencalonan memuat 5 berita (22,73%), disusul penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan prangkat hukum dalam sidang sebanyak 3 berita (13,64%), proses pemilihan atau pelaksanaan sidang paripurna pemilihan hanya satu berita dengan persentase sebesar (4,54%). Sedangkan untuk tiga aspek yang menyangkut agenda pembahasan dan
penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Lampung tahun 2003 yakni pembahasan APBD bidang pertanian dan pedesaan, pembahasan APBD bidang pendidikan, dan penetapan APBD sama sekali tidak dimuat oleh Harian Umum Kompas.

Sementara Surat Kabar Radar Lampung menyajikan persentase terbesar yakni pada aspek administrasi dan proses pencalonan yang merupakan sajian paling banyak yakni 40 berita (51,94%) yang lebih dominan dimuat di rubrik suksesi pada halaman 6 (enam). Urutan kedua sajian aspek dugaan melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme sebanyak 19 berita (24,68%), aspek penetapan APBD 2003 sebanyak 8 berita (10,40%), aspek penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan perangkat hukum dalam sidang 6 berita (7,78%), dan untuk aspek proses pemilihan dalam sidang paripurna dan pembahasan APBD bidang pendidikan sebanyak 2 berita (2,60%).

Dominannya pemberitaan tentang dugaan melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme di kedua media ini juga ditunjang oleh penemuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lampung, yang menyatakan bahwa money politics dalam pemilihan Gubernur Lampung tahun 2002 terjadi mulai dari tahap penjaringan sampai tahap pemilihan, dengan rincian: saat pembuatan persyaratan untuk menjadi calon, memasukan persyaratan ke panitia pemilihan, acara diskusi publik, pemberian hadiah bingkasan parsel dan Handphone kepada anggota DPRD, pengusulan calon melalui fraksi ke panitia pemilihan, lobi-lobi di hotel mewah, karaoke, rumah makan dan villa-villa, dan pemberian uang disaat pemilihan atau pemberian suara. (Tamara et al. 2003)
Dari Tabel 7 di atas, baik Harian Umum Kompas maupun Surat Kabar Radar Lampung tidak pernah memuat berita mengenai aspek pembahasan APBD Provinsi Lampung tahun 2003 bidang pertanian dan pedesaan yang merupakan bidang kerja komisi C untuk masalah-masalah anggaran (keuangan) termasuk sektor pertanian, komisi D bidang pembangunan juga ada di dalamnya pembangunan pertanian dan pedesaan, maupun komisi E yang menangani bidang kesejahteraan rakyat termasuk kesejahteraan masyarakat desa.

Berita berdasarkan Jenis Berita


Tabel 8. Frekuensi sajian berita berdasarkan jenis berita

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Jenis Berita</th>
<th>Kompas</th>
<th>Radar Lampung</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Frekuensi (kali)</td>
<td>Persentase (%)</td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Berita Langsung</td>
<td>14</td>
<td>63,64</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(Straight News)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Berita Investigasi</td>
<td>7</td>
<td>31,82</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(Investigation News)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Opini (Opinion News)</td>
<td>1</td>
<td>4,54</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Jumlah</td>
<td>22</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Dari 22 kali berita yang dimuat Harian Umum Kompas, sebanyak 14 kali (63,64%) menyajikan berita langsung (Straight News), kemudian 7 kali (31,82%) berita investigasi (Investigation News), dan hanya 4,54% atau satu kali dalam bentuk opini (Opinion News). Pemunculan opini tersebut diterima dari luar redaksi yakni dari akademisi yang dimuat Kamis, 24 April 2003 yang membahas kondisi politik lokal termasuk sukses piminan daerah Lampung, yang mengakibatkan gubernur terpilihnya harus berurusan dengan polisi karena terkait
beberapa kasus pidana. Sebanyak 77 berita di Surat Kabar Radar Lampung, sebanyak 51 kali (66,23%) adalah jenis berita langsung (*Straight News*), disusul 15 kali (19,48%) menampilkan opini (*Opinion News*), dan 11 kali (14,29%) mengkemas berita investigasi (*Investigation News*).


Tabel 9. Volume (cmk) pemuatan sajian jenis berita

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Jenis Berita</th>
<th>Kompas</th>
<th>Radar Lampung</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Volume (Cmk)</td>
<td>Volume (Cmk)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Persentase (%)</td>
<td>Persentase (%)</td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Berita Langsung</td>
<td>3.709,75</td>
<td>12.007,25</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(Straight News)</td>
<td>32,95</td>
<td>63,19</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Berita Investigasi</td>
<td>6.851,15</td>
<td>2.022,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(Investigation News)</td>
<td>60,84</td>
<td>10,64</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Opini (Opinion News)</td>
<td>700,00</td>
<td>4.973,50</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>6,21</td>
<td>26,17</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Jumlah</td>
<td>11.260,90</td>
<td>19.002,75</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabel 9 menggambarkan total keseluruhan berita yang dimuat Harian Umum Kompas sebesar 11.260,9 cm kolom dengan rincian berita investigasi (Investigation News) menempati 6.851,15 cm kolom atau 60,84%, berita
langsung (*Straight News*) sebesar 3.709,75 cm kolom (32,95%), dan opini 6,21%, dengan luas 700 cm kolom. Ruang terbesar yang ditempati oleh berita investigasi tersebut sangat beralasan, sebab berita investigasi di tulis panjang dan dipaparkan secara mendalam.

Surat Kabar Radar Lampung menempati ruang keseluruhan berita sebesar 19.002,75 cm kolom, dengan rincian terbesar digunakan untuk berita langsung (*Straight News*) sebesar 63,19% dengan luas 12.007,25 cm kolom, opini (*Opinion News*) dengan luas 4.973,5 cm kolom (26,17%), dan berita investigasi (*Investigation News*) sebesar 10,64% atau seluas 2.022 cm kolom.

**Berita berdasarkan penggunaan Sumber Informasi**

Sumber informasi adalah keterangan dari orang tentang fakta atau peristiwa yang dijadikan asal informasi baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis. Dalam penelitian ini penggunaan sumber informasi dikategorikan menjadi pakar/akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), mahasiswa, dan tokoh masyarakat.

Penggunaan sumber informasi yang dikategorikan menjadi empat dalam penelitian ini menggambarkan fungsi kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat (*civil society*) dalam ikut memantau lembaga legislatif daerah yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas pencalonan dan pemilihan gubernur 2002, serta pembahasan dan penetapan APBD tahun 2003. Digunakannya sumber informasi bagi surat kabar dalam penelitian ini mencerminkan arah dua surat kabar tersebut dalam
memburu sumber informasi untuk diliput, sehingga informasi yang akurat dan objektif dapat dicapai.

Berdasarkan analisis juri, berikut digambarkan frekuensi sajian berdasarkan penggunaan sumber informasi pada Tabel 10 dibawah ini:

Tabel 10. Frekuensi sajian berita berdasarkan penggunaan sumber informasi

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Sumber Informasi</th>
<th>Kompas</th>
<th>Radar Lampung</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Frekuensi (kali)</td>
<td>Persentase (%)</td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Pakar/Akademi</td>
<td>8</td>
<td>27,59</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Lembaga Swadaya Masyarakat</td>
<td>4</td>
<td>13,79</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Mahasiswa</td>
<td>0</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Tokoh Masyarakat</td>
<td>17</td>
<td>58,62</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Jumlah</td>
<td>29</td>
<td>100,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabel 10 menunjukkan bahwa penggunaan sumber informasi di Harian Umum Kompas didominasi tokoh masyarakat sebanyak 17 kali (58,62%), kemudian pakar/akademisi sebesar 8 kali (27,59%), dan lembaga swadaya masyarakat 4 kali (13,79%), sedangkan mahasiswa tidak ada. Sementara itu Surat Kabar Radar Lampung, sumber informasi didominasi oleh kalangan lembaga swadaya masyarakat sebanyak 44 kali (51,16%), pakar/akademisi 20 kali (23,26%), tokoh masyarakat 16 kali (18,60%), dan yang terendah adalah mahasiswa 6 kali (6,98%).

Persentase sumber informasi terbesar yang digunakan Harian Umum Kompas yakni tokoh masyarakat selaras dengan persentase terbesar dari aspek dugaan melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme yang ditunjukkan pada Tabel 7.

Surat Kabar Radar Lampung menggunakan sumber informasi terbanyak yaitu lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti dimuat tanggal 28 November 2002 yang menyoroti dibentuknya komite pemantau pemilihan Gubernur Lampung (KP2GL) yang bertekad mengawasi jalannya pemilihan Gubernur Lampung agar berjalan transprans, demokratis, dan terhindar dari praktik money politic. Selain itu lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Lampung juga menyoroti aspek administrasi dan proses pencalonan, seperti berita yang dimuat di Surat Kabar Radar Lampung tanggal 28 Desember 2002 atau dua hari sebelum hari pemilihan yang menyoroti bergabungnya beberapa LSM yakni lembaga bantuan hukum (LBH) Bandar Lampung, lampung parliament watch (LPW), dan komite anti korupsi (KoAK), serta aliansi jurnalis independent (AJI) Lampung yang menekankan pemantauan terhadap aksi anarkhis dan tindakan kekerasan serta tekanan struktural dalam sukses Gubernur Lampung.

Redaksi Harian Umum Kompas dan Surat Kabar Radar Lampung, menyampaikan bahwa penggunaan sumber informasi dalam tulisan dilatarbelakangi oleh peristiwa dan opini yang diangkat. Tidak dapat disangkal
bahwa sukses kepemimpinan daerah rawan praktik *money politic*, maka banyak elemen masyarakat yang menyoroti lembaga dewan pada aspek melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan kegiatan-kegiatan dewan yang menguntungkan individu maupun kelompok para pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Lampung, sehingga arah berita yang disajikan juga banyak menampilkan aspek tersebut.

**Berita berdasarkan Nilai Berita**

Surat kabar merupakan media massa tercetak yang memiliki fungsi menyampaikan dan menyebarluaskan informasi kepada khalayak secara obyektif. Informasi tersebut dikemas kedalam bentuk berita, dengan memperhatikan unsur-unsur nilai berita, sehingga menarik untuk dibaca oleh khalayak. Pengemasan berita tersebut tanpa melihat apakah informasi tersebut mengandung aspek keberhasilan atau kegagalan, karena nilai berita mengandung beberapa unsur antara lain, waktu (*timeliness*) yakni berita merupakan sesuatu yang baru dan terjadi sekarang atau sedang berlangsung, penting (*significance*) yang berkaitan dengan kejadian yang mempengaruhi kehidupan orang banyak, dekat (*proximity*) yaitu kejadian yang dekat dengan pembaca baik secara geografis maupun emosional, dan ketenaran (*prominence*) adalah hal-hal yang dikenal pembaca seperti publik figure dan atau pemimpin.

Penelitian ini merumuskan dua fokus kegiatan DPRD Provinsi Lampung yaitu proses pencalonan dan pemilihan Gubernur Lampung tahun 2002, dan pembahasan serta penetapan APBD tahun 2003 yang secara umum memenuhi kriteria unsur nilai berita. Sebagai surat kabar yang independen Harian Umum
Kompas dan Surat Kabar Radar Lampung diharapkan mampu menyajikan berita yang bersifat universal artinya mampu menyajikan berbagai permasalahan yang sedang berkembang menyangkut dua agenda kerja DPRD Provinsi Lampung tersebut. Tabel 11 dibawah ini menunjukkan frekuensi sajian berita berdasarkan nilai berita:

Tabel 11. Frekuensi sajian berita berdasarkan nilai berita

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Nilai Berita</th>
<th>Kompas</th>
<th>Radar Lampung</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Frekuensi</td>
<td>Persentase (%)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(kali)</td>
<td>(%)</td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Positif</td>
<td>1</td>
<td>4,54</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Negatif</td>
<td>21</td>
<td>95,46</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Jumlah</td>
<td>22</td>
<td>100,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Analisis juri pada Tabel 11 menunjukkan bahwa Harian Umum Kompas lebih cenderung memuat kegagalan (kecenderungan negatif) DPRD Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugasnya terhadap agenda pencalonan dan pemilihan gubernur tahun 2002, serta pembahasan dan penetapan APBD tahun 2003 sebanyak 21 berita (95,46%). Fakta ini ditunjukkan dari berita yang menyoroti polemik pembentukan panitia pemilihan Gubernur Lampung, Kompas 27 Desember 2003, maupun Kompas tanggal 19 November 2003 yang mengangkat persoalan dugaan politik uang ratusan juta rupiah menjelang pemilihan gubernur Lampung. Sedangkan kecenderungan positif hanya satu berita atau 4,54%.

Sementara pada Surat Kabar Radar Lampung menunjukkan bahwa sebanyak 47 berita (61,03%) adalah berita dengan kecenderungan negatif, seperti yang dimuat pada tanggal 8 November 2002 dengan judul “Panliah Gagal Pilih..."
Wakil Ketua” dan tanggal 14 Oktober 2002 berjudul “18 Hari dibentuk, Panlih Vakum”. Sedangkan kecenderungan positif sebanyak 30 berita (38,97%), seperti berita tanggal 12 November 2002 yang membahas panitia pemilihan gubernur selesai melakukan seleksi berkas calon Gubernur Lampung, dan berita mengenai sikap DPRDProvinsi Lampung dalam memberikan penilaian terhadap RAPBD yang diajukan pemerintah terlalu boros (Radar Lampung, Januari 2003).

Lebih dominannya kecenderungan negatif yang dimuat oleh Harian Umum Kompas dan Surat Kabar Radar Lampung menunjukkan independensi dua surat kabar tersebut. Karena apabila media (pers) tidak independen atau terkait dengan institusi pemerintah maka akan sulit menyajikan berita yang menyoroti kegagalan-kegagalan lembaga pemerintah. Redaksi Kompas dan Redaksi Surat Kabar Radar Lampung menyampaikan bahwa sebagai media massa, fungsi kontrol terhadap lembaga negara termasuk lembaga legislatif yang ada di daerah harus dijalankan sesuai amanat Undang-undang Nomor 40 Tentang Pokok-Pokok Pers.

Redaksi Harian Umum Kompas menyebutkan, dalam menyajikan berita dengan kecenderungan negatif, redaksi pernah mendapat tanggapan keberatan melalui surat dan telepon dari pendukung salah seorang calon gubernur. Sementara redaksi Surat Kabar Radar Lampung dalam menyajikan berita mempertimbangkan dampak negatif yang akan muncul dari pemberitaan yang cenderung negatif seperti pengerahan dan kekerasan massa para pendukung calon gubernur atau dampak psikologis seperti terpuruknya citra dewan.
Berita berdasarkan Tingkat Keakuratan

Tingkat keakuratan (akurasi) merupakan teknik redaksi suatu surat kabar dalam menyajikan berita selengkap mungkin kepada pembacanya. Tingkat akurasi berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan pembaca terhadap berita yang disajikan surat kabar yang dibaca. Semakin akurat redaksi menyajikan berita, maka akan semakin tinggi kepercayaan pembaca terhadap berita yang dibaca.

Penelitian ini mengkategorikan tingkat keakuratan berita menjadi 4 (empat) yaitu: kesesuaian judul, pencantuman waktu, penggunaan informasi pendukung, dan faktulitas berita. Hasil analisa isi tiga orang juri, terhadap masing-masing kategori dapat dilihat pada Tabel 12 berikut:
Tabel 12. Frekuensi sajian berita berdasarkan tingkat keakuratan

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Tingkat Keakuratan</th>
<th>Kompas</th>
<th>Radar Lampung</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Frekuensi (kali)</td>
<td>Persentase (%)</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Kesesuaian Judul</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sesuai</td>
<td>22</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Tidak</td>
<td>0</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Jumlah</td>
<td>22</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Pencantuman Waktu</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Dicantumkan Waktu</td>
<td>21</td>
<td>95,46</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Tidak</td>
<td>1</td>
<td>4,54</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Jumlah</td>
<td>22</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Kelengkapan Informasi Pendukung</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Ada Informasi Pendukung</td>
<td>5</td>
<td>22,73</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Tidak Ada Informasi Pendukung</td>
<td>17</td>
<td>77,27</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Jumlah</td>
<td>22</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Faktualitas Berita</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Ada Pencampuran Fakta dan Opini</td>
<td>1</td>
<td>4,54</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Tidak Mencampur Fakta dan Opini</td>
<td>21</td>
<td>95,46</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Jumlah</td>
<td>22</td>
<td>100,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabel 12 diatas menunjukkan, selama delapan bulan pemberitaan tentang pencalonan dan pemilihan Gubernur Lampung tahun 2002, serta pembahasan dan penetapan APBD tahun 2003 menunjukkan bahwa dari 22 (100%) berita Harian Umum Kompas dan 77 (100%) berita Surat Kabar Radar Lampung menggambarkan adanya kesesuaian judul. Artinya judul yang ditampilkan oleh kedua surat kabar tersebut telah mencerminkan isi, kalimat yang sama pada isi berita, dan atau kutipan yang jelas-jelas ada dalam keseluruhan berita.

Pencantuman waktu peristiwa atau wawancara diperlukan untuk melihat akurasi fakta atau opini. Pencantuman waktu sangat penting dalam sebuah berita, karena berkaitan dengan kapan seorang wartawan melakukan pertemuan melakukan wawancara dengan sumber informasi atau melihat terjadinya peristiwa. Tabel diatas menunjukkan bahwa satu (4,54%) berita Harian Umum Kompas tidak mencantumkan waktu, sedangkan 21 berita (95,46%) mencantumkan waktu berupa tanggal ataupun kata-kata. Persentase 4,54% yang tidak mencantumkan waktu pada tulisan Harian Umum Kompas tersebut merupakan opini yang diterima redaksi yang dimuat, Kamis 24 April 2003 dengan judul “Balada Politik Lokal” yang ditulis oleh dosen Fisip Universitas Nasional Jakarta.

Surat Kabar Radar Lampung menunjukkan dari 77 berita yang dimuat selama delapan bulan terdapat 64 berita (83,11%) mencantumkan waktu, sedangkan 16,89% atau 13 berita tidak mencantumkan waktu. Ke-13 berita yang tidak mencantumkan waktu tersebut merupakan opini yang diterima dari luar redaksi dari berbagai sumber antara lain akademisi dan tokoh masyarakat.
Pencantuman waktu sangat penting dalam merumuskan suatu berita, guna mengetahui berita tersebut suatu fakta atau opini. Bila dikaitkan dengan Tabel 8 pada kolom opini (Opinion News), maka dapat dilihat adanya kesamaan angka 4,54% jenis berita opini (Opinion News) dengan tidak dicantumkannya waktu pada Tabel 12 diatas pada kolom tidak dicantumkan waktu di Harian Umum Kompas. Sedangkan pada kolom Surat Kabar Radar Lampung pada Tabel 7 yang menunjukkan opini tercatat angka 15 (19,48%) tidak sama dengan angka yang tertera pada kolom tidak dicantumkan waktu pada Tabel 12 yakni ada 13 berita (16,89%) yang tidak mencantumkan waktu. Hasil analisa isi terhadap 2 (dua) berita Surat Kabar Radar Lampung yang masuk kedalam kategori opini yang mencantumkan waktu wawancara tersebut adalah wawancara wartawan Surat Radar Lampung dengan akademisi yang ditulis dalam bentuk opini.

Penyajian foto dan gambar karikatur berkaitan erat dengan daya tarik surat kabar bagi pembacanya dan sekaligus mendorong minat orang untuk membaca tulisan yang terdapat foto atau gambar. Sedangkan informasi pendukung lainnya seperti tabel statistik, undang-undang maupun peraturan perundangan membuat suatu berita mempunyai nilai keakuratan yang tinggi. Tabel 12 menunjukkan Harian Umum Kompas didominasi oleh berita yang tidak menggunakan informasi pendukung sebanyak 17 berita (77,27%). Sementara itu berita yang menggunakan informasi pendukung sebanyak 5 berita (22,73%). Dari ke-5 berita tersebut hanya satu berita yang menampilkan foto yakni tentang dibawanya Gubernur Lampung terpilih Alzier Dianis Thabrani menggunakan helikopter ke Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabes Polri) dari Markas Kepolisian Daerah Lampung yang dimuat Harian Umum Kompas Senin 23 April

Tabel 12 juga menunjukkan bahwa sebanyak 43 berita (55,84%) yang dimuat Surat Kabar Radar Lampung tidak menggunakan informasi pendukung. Selebihnya 34 berita (44,16%) menggunakan informasi pendukung. Yang menarik dari informasi pendukung yang digunakan Surat Kabar Radar Lampung adalah gambar karikatur yang menyertai tulisan opini dengan judul “Sosio Demokrasi Sukses Lampung”, dan berita tanggal 31 Desember 2002 yang dimuat di halaman satu, yakni sehari setelah pemilihan Gubernur Lampung yang dimenangkan oleh pasangan Alzier Dianis Thabrani dan Ansyori Yunus. Dari berita tersebut dimuat 8 (delapan) foto yang menggambarkan suasana sidang, penghitungan suara, sampai eksperisi para calon gubernur dan wakil gubernur saat penghitungan suara, dan dikawalnya Alzier Dianis Thabrani setelah dinyatakan sebagai pemenang dalam pemilihan tersebut.

Secara keseluruhan berita Surat Kabar Radar Lampung yang menggunakan informasi pendukung foto dan gambar karikatur sebanyak 20 berita, menggunakan tabel daftar calon gubernur dan wakil gubernur 2 berita, sedangkan 12 berita lainnya menggunakan informasi pendukung berupa undang-undang dan peraturan pemerintah.

Kategori fakta-fuliatas berita dibagi atas dua konsep yakni ada pencampuran fakta dan opini, yaitu apabila dalam berita terdapat kata-kata yang bersifat opini seperti tampaknya, diperkirakan, diramalkan, kontroversi, dan
manuver, serta tidak ada pencampuran fakta dan opini seperti pada kata-kata tadi. Tabel 12 menunjukkan 95,46% berita di Harian Umum Kompas tidak mencampurkan fakta dan opini, dan hanya satu berita (4,54%) tedapat kata-kata yang bersifat opini. Satu berita tersebut adalah tulisan opini yang ditulis oleh kalangan akademisi yang dimuat pada Kamis, 24 April 2003. Sementara Surat Kabar Radar Lampung menunjukkan 62 berita (80,52%) tidak mencampurkan fakta dan opini artinya tidak terdapat kata-kata yang bersifat opini dan 15 berita (19,48%) terdapat kata-kata yang bersifat opini.

Tabel diatas tergambar bahwa tingkat keakuratan berita yang disajikan Harian Umum Kompas tergolong tinggi. Ini ditunjukkan dengan persentase yang besar dari kesesuaian judul yang mencapai 100,00%, pencantuman waktu 95,46%, tidak mencampurkan fakta dan opini 95,46%. Sedangkan untuk kelengkapan informasi pendukung tergolong kecil yakni 22,73%. Sementara Surat Kabar Radar Lampung juga menggambarkan tingkat keakuratan yang tinggi yang ditunjukkan dengan kesesuaian judul mencapai 100,00%, pencantuman waktu 83,11%, tidak mencampurkan fakta dan opini 80,52%, dan penggunaan informasi pendukung 44,16%.

Menurut redaksi Harian Umum Kompas rendahnya persentase penggunaan informasi pendukung berupa pemuatan foto, gambar, karikatur, tabel, perangkat perundang-undangan maupun peraturan perundangan lainnya bukan berarti berita yang disajikan kurang lengkap, tetapi lebih disebabkan keterbatasan ruang. Secara umum berita yang disajikan telah memenuhi kriteria suatu berita dengan keakuratan yang tinggi termasuk didalamnya melakukan konfirmasi berita.
Berita Berdasarkan Tanggapan Pimpinan DPRD Provinsi Lampung


Tabel 13. Frekuensi sajian berita berdasarkan tanggapan pimpinan DPRD

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Tanggapan Pimpinan DPRD Provinsi Lampung</th>
<th>Kompas</th>
<th>Radar Lampung</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Frekuensi (kali)</td>
<td>Persentase (%)</td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Ada</td>
<td>16</td>
<td>72,72</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Tidak Ada</td>
<td>6</td>
<td>27,28</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Jumlah</td>
<td>22</td>
<td>100,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Tabel 13 diatas menunjukkan hasil analisis juri bahwa 16 berita (72,72%) Harian Umum Kompas ada tanggapan dari pimpinan DPRD Provinsi Lampung, sedangkan 6 berita (27,28%) tidak ada tanggapan. Surat Kabar Radar Lampung menunjukkan 41 berita (53,24%) tidak ada tanggapan pimpinan DPRD Provinsi Lampung dan 36 berita (46,76%) ada tanggapan pimpinan DPRD. Sebagai media yang menganut azas berimbang Harian Umum Kompas telah menunjukan persentase yang cukup besar dalam mengkonfirmasikan suatu berita. Hanya saja Surat Kabar Radar Lampung, masih menunjukkan dominasi berita yang tidak meminta tanggapan pimpinan DPRD Provinsi Lampung.


**Berita Berdasarkan Sikap Pers Dalam Tajuk Rencana/Editorial**

Tajuk rencana atau editorial adalah tulisan yang dibuat oleh redaksi surat kabar yang berisi sikap surat kabar tersebut terhadap suatu permasalahan atau fokus yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian ini digunakan dua konsep untuk menentukan sikap pers dalam tajuk rencana atau editorial yakni netral dan tidak netral. Netral artinya dari keseluruhan tajuk rencana atau editorial yang
dimuat tidak memihak siapapun baik itu perorangan, kelompok orang atau lembaga. Sedangkan tidak netral, bila mengandung keberpihakan kepada seseorang, kelompok orang atau lembaga tertentu. Hasil analisa isi yang dilakukan oleh juri terhadap Harian Umum Kompas dan Surat Kabar Radar Lampung dalam penelitian ini tergambar dalam Tabel 14 dibawah ini.

Tabel 14. Frekuensi sajian berita berdasarkan sikap pers dalam tajuk rencana/editorial

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Sikap Pers Dalam Tajuk Rencana(Editorial)</th>
<th>Kompas</th>
<th>Radar Lampung</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Frekuensi</td>
<td>Persentase</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(kali)</td>
<td>(%)</td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Netral</td>
<td>0</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Tidak Netral</td>
<td>0</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Jumlah</td>
<td>0</td>
<td>0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Surat Kabar Radar Lampung menyajikan 3 (tiga) sikap dalam tajuk rencana. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari tiga tajuk rencana yang ditulis 2 topik (66,67%) diantaranya dinilai netral. Sementara itu satu tajuk rencana (33,33%) dinilai tidak netral. Dari analisa yang dilakukan terhadap tajuk rencana yang dinilai tidak netral tersebut tergambar bahwa redaksi memaparkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di DPRD Provinsi Lampung antara lain dugaan politik uang dalam proses pemilihan gubernur 30 Desember 2002, dan terlihat malasnya beberapa anggota dewan mengikuti rapat-rapat yang sudah dijadwalkan.

Menurut redaksi Surat Kabar Radar Lampung dalam memuat tajuk rencana redaksi mempertimbangkan beberapa aspek yaitu, lebih concern ke isu nasional yang mencapai 70%, tinggal mengambil dari koran Jawa Pos (JPNN) yang merupakan group surat kabarnya. Pertimbangan tersebut diambil dengan alasan bahwa dalam menulis tajuk rencana membutuhkan waktu 2-3 jam yang apabila dimanfaatkan akan dapat menyelesaikan beberapa halaman koran dalam setiap harinya.
SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisa isi terhadap berita tentang Peran DPRD Provinsi Lampung dengan agenda pencalonan dan pemilihan Gubernur Lampung tahun 2002 serta pembahasan dan penetapan APBD Lampung tahun 2003, dapat disimpulkan:


3. Penggunaan sumber informasi dapat melihat seberapa besar kontrol sosial (pengawasan) yang dilakukan pers bersama-sama masyarakat (*civil society*). Harian Umum Kompas menampilkan tokoh masyarakat sebanyak 17 berita (58,62%), pakar/akademisi sebanyak 8 berita (27,59%), lembaga swadaya masyarakat sebanyak 4 berita (13,79%), dan mahasiswa tidak ada. Surat Kabar Radar Lampung, menggunakan sumber informasi, didominasi kalangan lembaga swadaya masyarakat sebanyak 44 berita (51,16%), kemudian pakar/akademisi 20 berita (23,26%), tokoh masyarakat sebanyak 16 berita (18,60%), dan yang terendah adalah mahasiswa sebanyak 6 berita (6,98%). Dari persentase diatas tergambar bahwa peran *civil society* dari berbagai profesi di Provinsi Lampung telah menunjukkan kepedulian dalam mengawasi jalannya pemerintahan dengan secara bersama-sama melakukan

4. Harian Umum Kompas memuat 21 berita (95,46%) dengan kecenderungan negatif. Sementara Surat Kabar Radar Lampung memuat 47 berita (61,03%) dengan kecenderungan negatif. Dengan demikian independensi kedua media yakni Harian Umum Kompas dan Surat Kabar Radar Lampung terbukti dengan berani menyajikan berita yang menyangkut kegagalan dewan dalam melaksanakan tugas. Hal ini menunjukan keberanian pers dalam melakukan kontrol sosial terhadap lembaga legislatif di provinsi Lampung.

5. Dalam hal tingkat keakuratan (akurasi) yang menyangkut kesesuaian judul, baik Harian Umum Kompas maupun Surat Kabar Radar Lampung menunjukkan adanya kesesuaian judul dari seluruh berita. Kategori waktu menggambarkan hanya satu (4,54%) berita Harian Umum Kompas yang tidak mencantumkan waktu, sedangkan 21 berita dengan persentase sebesar 95,46% mencantumkan waktu berupa tanggal ataupun kata-kata. Surat Kabar Radar Lampung terdapat 83,11% (64 berita) mencantumkan waktu, sedangkan 16,89% atau 13 berita tidak mencantumkan waktu. Untuk data pendukung Harian Umum Kompas tidak menggunakan data pendukung sebanyak 17 berita (77,27%). Sedangkan Surat Kabar Radar Lampung tidak menggunakan data pendukung sebanyak 43 berita (55,84%). Kategori fakultiatas berita pada Harian Umum Kompas tidak mencampurkan fakta dan opini sebanyak...
21 berita (95,46%). Sementara Surat Kabar Radar Lampung sebanyak 62 berita (80,52%) berita tidak mencampurkan fakta dan opini.

6. Tanggapan pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Harian Umum Kompas menunjukkan 16 berita (72,72%) ada tanggapan, sedangkan 6 berita (27,28%) tidak ada tanggapan. Sementara Surat Kabar Radar Lampung menunjukkan 41 berita (53,24%) tidak ada tanggapan pimpinan DPRD Provinsi Lampung dan 36 berita (46,76%) ada tanggapan. Dengan demikian tidak semua berita yang disajikan oleh Harian Umum Kompas dan Surat Kabar Radar Lampung mendapat tanggapan pimpinan DPRD Provinsi Lampung.

Saran-saran

1. Pada masa yang akan datang, hendaknya redaksi Harian Umum Kompas dan Surat Kabar Radar Lampung menyajikan berita agenda DPRD tentang pembahasan pembangunan pertanian dan pedesaan, sehingga masyarakat menjadi tahu, apakah DPRD juga *concern* terhadap pembangunan pertanian dan pedesaan.


3. Dalam menyajikan berita hendaknya Surat Kabar Radar Lampung lebih mengedepankan azas berimbang dan hak jawab.

4. Kepada pimpinan maupun anggota dewan DPRD lebih membuka diri (*transparans*) dalam mengekspos agenda dan hasil-hasil rapat maupun kegiatan yang dilakukan, sehingga masyarakat dapat mengetahui kinerja lembaga dewan.
DAFTAR PUSTAKA

Buku


**Tesis**


**Surat Kabar dan Majalah**


Lampiran
Lampiran 1.

STUKTUR ORGANISASI SURAT KABAR
HARIAN RADAR LAMPUNG
(Jawa Pos Network News)

General Manager

Pemimpin Umum

Pemimninan Redaksi

Pemimninan Perusahaan

Pencetakan

Redaktur

Ketua

Iklan

Sirkulasi

Staf

WARTAWAN
### Lampiran 3.

#### Berita Harian Umum Kompas dan Surat Kabar Radar Lampung yang dianalisis

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Judul Berita</th>
<th>Hari/Tanggal dimuat</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Mendagri Berhentikan Ketua DPRD Lampung</td>
<td>Selasa, 1 Oktober 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>DPRD Lampung miliki Dua Ketua</td>
<td>Rabu, 9 Oktober 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Sukses Lampung Mulai Digoyang Politik Uang</td>
<td>Selasa, 19 November 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>75 Anggota DPRD Akan Dikarantina</td>
<td>Kamis, 26 Desember 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>Oemarsono Ditolak Fraksi PDI Perjuangan</td>
<td>Kamis, 19 Desember 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>Calon Gubernur Lampung diduga Terlibat Sejumlah Tindak Pidana</td>
<td>Kamis, 2 Januari 2003</td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>Massa PDI Perjuangan Lampung Desak Pelantikan Alzier Thabrani</td>
<td>Selasa, April, 2003</td>
</tr>
<tr>
<td>13.</td>
<td>Pemerintah Pusat Harus Tegas Sikapi Kasus Lampung</td>
<td>Kamis, April 2003</td>
</tr>
<tr>
<td>14.</td>
<td>16 Anggota PDI Perjuangan Lampung Dipecat, Termasuk Ketua DPRD</td>
<td>April 2003</td>
</tr>
<tr>
<td>15.</td>
<td>Alzier Ditangkap Karena Bersembunyi</td>
<td>Selasa, 22 April 2003</td>
</tr>
<tr>
<td>16.</td>
<td>DPRD Lampung Tolak Pemilihan Ulang, Meski Gubernur Terpilih Ditahan</td>
<td>Rabu, 23 April 2003</td>
</tr>
<tr>
<td>17.</td>
<td>Balada Politik Lokal</td>
<td>Kamis, 24 April 2003</td>
</tr>
<tr>
<td>18.</td>
<td>27 Anggota DPRD Lampung Ajukan Mosi Tak Percaya</td>
<td>Kamis, 24 April 2003</td>
</tr>
<tr>
<td>19.</td>
<td>Pelantikan Gubernur Lampung Menunggu Prosess Hukum</td>
<td>Jum′at, April 2003</td>
</tr>
<tr>
<td>20.</td>
<td>Setelah Alzier Terpilih, Anggota DPRD Lampung Ramai-ramai Beli Mobil Baru</td>
<td>Sabtu, 26 April 2003</td>
</tr>
<tr>
<td>22.</td>
<td>Oemarsono Dikaitkan Mosi Tidak Percaya 27 Anggota DPRD Lampung</td>
<td>Rabu, 30 April 2003</td>
</tr>
</tbody>
</table>
# Surat Kabar Radar Lampung

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Judul Berita</th>
<th>Hari/Tanggal dimuat</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Metode Baru APBD Dimatangkan</td>
<td>Selasa, 3 September 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Tak Terpengaruh Ancaman PDIP</td>
<td>Kamis, 26 September 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Tunda Pilgub Satu Tahun, Atau Ketua Panlih Didelegasikan Pada Wakil Ketua Dewan</td>
<td>Sabtu, 28 September 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Perlu Peran <em>Civil Society</em></td>
<td>Sabtu, 5 Oktober 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Elemen Ancam Ambil Alih Dewan</td>
<td>Minggu, 6 Oktober 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>Atidah Pertahankan Fasilitas Ketua, Fraksi Setuju Revisi Tatib</td>
<td>Kamis, 10 Oktober 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>Tatib DPRD Bakal Direvisi</td>
<td>Sabtu, 12 Oktober 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>Rapat Panmus Terancam Deadlock</td>
<td>Minggu, 13 Oktober 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>Yang Penting Beras, Bukan Gubernur</td>
<td>Senin, 14 Oktober 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>18 Hari Dibentuk, Panlih Vakum, Hari ini Baru Ada Rapim</td>
<td>Selasa, 15 Oktober 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>11.</td>
<td>Panmus Desak Revisi Jadwal</td>
<td>Selasa, 15 Oktober 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>13.</td>
<td>Pendaftaran Balongub Dimulai</td>
<td>Senin, 28 Oktober 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>14.</td>
<td>18 Balon Ambil Formulir, FPG Akui Cuma Incar Cawagub</td>
<td>Selasa, 29 Oktober 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>17.</td>
<td>Total 48 Balon Ambil Formulir</td>
<td>Kamis, 07 November 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>18.</td>
<td>Panlih Gagal Pilih Wakil Ketua</td>
<td>Jum’at, 08 November 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>19.</td>
<td>13 Balongub Resmi Serahkan Berkas</td>
<td>Selasa, November 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>20.</td>
<td>Panlih Rampung seleksi Berkas</td>
<td>Selasa, 12 November 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>22.</td>
<td>Dua Balon Gubernur Gugur</td>
<td>Kamis, 14 November 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>23.</td>
<td>Aroma Tak Sedap Mulai Merebak, Beredar Isu Bayar Panjar Rp. 50 Juta</td>
<td>Jumat, 15 November 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>25.</td>
<td>Oemarsono Cek Berkas Ke Panlih, Tujuh Balon Susul Serahkan Formulir</td>
<td>Sabtu, 16 November 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>27.</td>
<td>10 Balongub dan Bawagub Gugur, Irfan Sosialisasi Diri Ke Fraksi</td>
<td>Senin, 18 November 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>28.</td>
<td>KoAK Ikut Pantau</td>
<td>Senin, 18 November 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>30.</td>
<td>Ampera Temui Panlih</td>
<td>Selasa, 19 November 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>No.</td>
<td>Judul</td>
<td>Tanggal</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>-------</td>
<td>------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>Tiga Balongub Tak Hadiri Bedah Visi</td>
<td>Kamis, 21 November 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>Malas Bedah Visi</td>
<td>Jum'at, 22 November 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>Unik, Bedah Visi FTNI/Polri</td>
<td>Sabtu, 23 November 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>Awasi Money Politics</td>
<td>Sabtu, 23 November 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>Kasus Tanah Hingga Soal Perempuan</td>
<td>Kamis, 28 November 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>Sosio Demokrasi Suksesi Lampung</td>
<td>Kamis, 28 November 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>Ingatkan Potensi Perempuan</td>
<td>Kamis, 28 November 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>Penyampaian Misi Tahap Dua Besok</td>
<td>Jum’at, 29 November 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>Fraksi Isyaratkan Kocok Ulang Balon</td>
<td>Jum’at, 13 Desember 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>Cagub Masih Harus Deg-degan</td>
<td>Jum’at, 13 Desember 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>Harapan Dari Proses Pemilihan Gubernur, Menyelamatkan Produk Konstitusional</td>
<td>Jum’at, 13 Desember 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>Penyampaian Visi – Misi Seru</td>
<td>Senin, 16 Desember 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>Calon PDIP Ditetapkan Hari Ini</td>
<td>Rabu, 18 Desember 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>Ingatkan Anggota Dewan</td>
<td>Rabu, 18 Desember 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>Suksesi dan Makna Persaudaraan</td>
<td>Rabu, 18 Desember 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>Paradigma Suksesi Pemimpin Lampung (1)</td>
<td>Kamis, 19 Desember 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>Paradigma Suksesi Pemimpin Lampung (2)</td>
<td>Jumat, 20 Desember 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>Ogah Tampung Aspirasi, Depdargri Tunggu Aspirasi Sebelum 28 Desember</td>
<td>Kamis, 19 Desember 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>Suksesi dan Pertikaian Politik</td>
<td>Kamis, 19 Desember 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td>Membaca Peta Kekuatan PDIP – Golkar</td>
<td>Jumat, 20 Desember 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td>Nyali Kalangan DPRD Ciut, Tak Menyetujui Disumpah Ulang</td>
<td>Jumat, 20 Desember 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>53</td>
<td>Sampaikan Seruan Moral</td>
<td>Sabtu, 21 Desember 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>54</td>
<td>Munculkan Pemimpin Eksekutif</td>
<td>Sabtu, 21 Desember 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>55</td>
<td>Suksesi v Pengerahan Massa</td>
<td>Sabtu, 21 Desember 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>56</td>
<td>Tolak Kekerasan</td>
<td>Minggu, 22 Desember 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>57</td>
<td>Pilgub Buka Celah 3 Kali Money Politics</td>
<td>Minggu, 22 Desember 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>58</td>
<td>Suksesi Terindikasi Sarat Money Politics, JPSKD Ajak Kawal Pigub</td>
<td>Minggu, Desember 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>59</td>
<td>Dikarantina Di Singapura</td>
<td>Senin, 23 Desember 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>60</td>
<td>Harga Suara Rp 750 Juta</td>
<td>Sabtu, 28 Desember 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>61</td>
<td>Gabung Awasu Suksesi</td>
<td>Minggu, 29 Desember 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>62</td>
<td>MUI Anjurkan Anggota Dewan Disumpah Ulang</td>
<td>Minggu, 29 Desember 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>63</td>
<td>Alzier Gubernur Terpilih</td>
<td>31 Desember 2002</td>
</tr>
<tr>
<td>64</td>
<td>Pilgm, Hukum dan Konsiprasi Politik</td>
<td>Senin, 6 Januari 2003</td>
</tr>
<tr>
<td>65</td>
<td>APBD Tak Akan Terlaksana 100 %</td>
<td>Jumat, 10 Januari 2003</td>
</tr>
<tr>
<td>66</td>
<td>RAPBD 2003 Naik Rp 30,7 M</td>
<td>Senin, 13 Januari 2003</td>
</tr>
<tr>
<td>67</td>
<td>Anggaran Pendidikan Tak Sentuh Kepentingan Rakyat</td>
<td>Rabu, 15 Januari 2003</td>
</tr>
<tr>
<td>68</td>
<td>RAPBD 2003 Dinilai Boros</td>
<td>Kamis, 16 Januari 2003</td>
</tr>
<tr>
<td>69</td>
<td>Pembahasan RAPBD 2003 Menyedihkan</td>
<td>Jumat, 17 Januari 2003</td>
</tr>
<tr>
<td>No.</td>
<td>Judul</td>
<td>Tanggal</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>------------------------------------------------</td>
<td>-----------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>72.</td>
<td>Pengesahan RAPBD Jadi Polemik</td>
<td>Jumat, 14 Februari 2003</td>
</tr>
<tr>
<td>73.</td>
<td>Ricuh, APBD Divoting</td>
<td>Minggu, 16 Februari 2003</td>
</tr>
<tr>
<td>74.</td>
<td>APBD Bermasalah</td>
<td>Senin, 17 Februari 2003</td>
</tr>
<tr>
<td>75.</td>
<td>Citra Dewan</td>
<td>Senin, 17 Februari 2003</td>
</tr>
<tr>
<td>76.</td>
<td>Dewan Bahas Pelantikan Gubernur</td>
<td>Maret 2003</td>
</tr>
<tr>
<td>77.</td>
<td>Lantik Atau Batalkan Alzier!</td>
<td>Maret 2003</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Lampiran 4.

Berita berdasarkan penggunaan Sumber Informasi:

Harian Umum Kompas

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kompas</th>
<th>Sumber Informasi</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Pakar/ Akademisi</td>
<td>LSM</td>
<td>Mahasiswa</td>
<td>Tokoh Masyarakat</td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 4</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 5</td>
<td></td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 6</td>
<td></td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 7</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 8</td>
<td></td>
<td></td>
<td>v</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 9</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>v</td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 10</td>
<td></td>
<td>v</td>
<td>v</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 11</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>v</td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 12</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>v</td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 13</td>
<td></td>
<td></td>
<td>v</td>
<td>v</td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 14</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>v</td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 15</td>
<td></td>
<td></td>
<td>v</td>
<td>v</td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 16</td>
<td></td>
<td></td>
<td>v</td>
<td>v</td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 17</td>
<td></td>
<td>v</td>
<td>v</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 18</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>v</td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 19</td>
<td></td>
<td></td>
<td>v</td>
<td>v</td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 20</td>
<td></td>
<td></td>
<td>v</td>
<td>v</td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 21</td>
<td></td>
<td></td>
<td>v</td>
<td>v</td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 22</td>
<td></td>
<td></td>
<td>v</td>
<td>v</td>
</tr>
<tr>
<td>Jumlah</td>
<td></td>
<td>8</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Total Sumber Informasi</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td>Radar Lampung</td>
<td>Sumber Informasi</td>
<td>Pakar/Akademi</td>
<td>LSM</td>
<td>Mahasiswa</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>---------------</td>
<td>-----</td>
<td>-----------</td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 2</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 3</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 4</td>
<td></td>
<td>v</td>
<td>v</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 5</td>
<td>v</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 6</td>
<td>v</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 7</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 8</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 9</td>
<td></td>
<td>v</td>
<td>v</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 10</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 11</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 12</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 13</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 14</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 15</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 16</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 17</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 18</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 19</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 20</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 21</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 22</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 23</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 24</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 25</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 26</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 27</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 28</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 29</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 30</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 31</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 32</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 33</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 34</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 35</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 36</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 37</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 38</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 39</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 40</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berita 41</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berita</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>---</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>53</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>54</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>55</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>56</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>57</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>58</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>59</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>61</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>62</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>63</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>65</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>66</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>67</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>68</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>69</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>70</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>71</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>72</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>73</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>74</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>75</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>76</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>77</td>
<td>v</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Jumlah</td>
<td>20</td>
<td>44</td>
<td>6</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>86</td>
</tr>
</tbody>
</table>